



RENCANA STRATEGIS **RENSTRA**

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA PANGKALPINANG**

2024 - 2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan adalah proses yang kontinyu, terdiri dari keputusan atau pilihan dari berbagai cara untuk menggunakan sumber daya yang ada, dengan sasaran untuk mencapai tujuan tertentu di masa mendatang. Pembangunan adalah Suatu upaya untuk melakukan perubahan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat (proses perubahan ke arah yang lebih baik). Perencanaan Pembangunan adalah cara atau teknik untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam proses pembangunan sehingga mampu mewujudkan masyarakat yang maju, makmur dan sejahtera. Menurut Jensen (1995) merekomendasikan perencanaan pembangunan sebagai hal-hal yang harus bersifat kompleks, sehingga prosesnya tetap memperhitungkan kemampuan sumber daya yang ada, baik sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya fisik, dan sumber daya lainnya.

Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan untuk merumuskan strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, perencanaan pembangunan tersebut dirumuskan dalam perencanaan yang bersifat jangka panjang 20 (dua puluh) tahun, menengah 5 (lima) tahun dan pendek 1 (satu) tahun. Di tingkat Kota, ketiga bentuk perencanaan tersebut menghasilkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP D), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sedangkan di tingkat Perangkat Daerah (PD) terdapat dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) untuk jangka waktu lima tahun dan Rencana Kerja (Renja) untuk periode satu tahun.

RENSTRA Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, dan program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan wajib dan/Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib



dan/atau RPJMD dan bersifat indikatif. Tahun 2023 merupakan tahun terakhir dalam periode RPJMD Kota Pangkalpinang tahun 2018-2023, hal ini berkaitan dengan berakhirnya masa jabatan Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang periode 2018-2023. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang bahwa Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang berakhir masa jabatannya tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diangkat penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota melalui Pemilihan serentak nasional pada tahun 2024 kemudian selanjutnya Sebagaimana Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) bagi daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan daerah otonom baru, maka bagi daerah yang tidak memiliki kepala daerah dikarenakan masa jabatan berakhir pada Tahun 2023 maka Walikota menyusun Dokumen RPD Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2024 dan Renstra Tahun 2024-2026. RPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerah yang berakhir pada tahun 2022 atau 2023.

Berdasarkan latar belakang di atas serta mempedomani aturan-aturan tersebut, maka Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Bappeda dan Litbang) Kota Pangkalpinang melakukan penyusunan dokumen Rencana Strategis Tahun 2024-2026 dengan berpedoman kepada dokumen RPD Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026. Selanjutnya, RENSTRA Bappeda dan Litbang Kota Pangkalpinang tahun 2024-

2026 akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) setiap tahun selama periode tersebut.

1.2. **Landasan Hukum**

Adapun landasan hukum dalam penyusunan RENSTRA Bappeda dan Litbang Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia) Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk kotapraja dalam lingkungan daerah tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);



6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.



12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022;
14. Keputusan Menteri dalam Negeri nomor 050.5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
15. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan daerah Otonom baru;
16. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 3 Seri E);
17. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang Tahun 2011-2030 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2012 Nomor 01);
18. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 Nomor 11 Seri E);
19. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota



Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 1);

20. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 51 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unsur Penunjang Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2021 Nomor 51);
21. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024 – 2026 (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2023 Nomor 144);
22. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Renstra Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024 – 2026 (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2023 Nomor 148).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan RENSTRA Bappeda dan Litbang Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 adalah untuk menggambarkan arah dan pedoman pelaksanaan program, kegiatan dan Sub kegiatan serta kondisi yang ingin dicapai oleh Bappeda dan Litbang selama kurun waktu tiga tahun ke depan dalam rangka mendukung pencapaian RPD Kota Pangkalpinang yang tertuang dalam dokumen RPD Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026. Adapun tujuan penyusunan RENSTRA Bappeda dan Litbang adalah :

1. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan dan Sub kegiatan pembangunan untuk jangka waktu tiga tahun ke depan sesuai tugas dan fungsi Bappeda dan Litbang dalam rangka mensinkronisasi serta mensinergikan perencanaan pembangunan daerah;
2. Merumuskan indikator dan target kinerja yang jelas dan terukur yang menjadi pedoman pencapaian perencanaan pembangunan dalam rangka



meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan di Pemerintah Kota Pangkalpinang

3. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Bappeda dan Litbang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya terkait perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan
4. Menjadi kerangka dasar dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah guna menunjang pencapaian target kinerja pembangunan daerah terutama pada penyusunan RENJA yang bersifat tahunan:
5. Meningkatkan kualitas pelayanan publik.

1.4. **Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan RENSTRA Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026, meliputi :

Bab I PENDAHULUAN

Pendahuluan berisikan tentang:

Latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan RENSTRA Bappeda dan Litbang Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026.

Bab II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH

Gambaran Pelayanan Bappeda dan Litbang berisikan informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RENSTRA Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengemukakan hasil analisis

terhadap Renstra K/L dan Renstra Bappeda kabupaten/kota, hasil telaahan terhadap RTRW yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Bappeda dan Litbang pada tiga tahun mendatang.

Bab III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan Bappeda dan Litbang

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Bappeda dan Litbang beserta faktor yang mempengaruhinya.

3.2 Telaahan Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD)

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Bappeda dan Litbang yang terkait dengan pencapaian tujuan dan sasaran RPD dalam periode tahun 2024-2026. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Bappeda dan Litbang, dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Bappeda dan Litbang yang dapat mempengaruhi pencapaian sasaran dan tujuan RPD. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Bappeda dan Litbang

3.3 Telaahan RENSTRA K/L dan RENSTRA Bappeda Provinsi

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Bappeda dan Litbang yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Bappeda dan Litbang ditinjau dari sasaran jangka menengah RENSTRA K/L ataupun RENSTRA Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Pada bagian ini mengemukakan faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendorong dalam pelayanan Bappeda dan Litbang yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Bappeda dan Litbang ditinjau dari implikasi RTRW.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Pada bagian ini mengemukakan apa saja yang menjadi isu strategis yang akan ditangani melalui RENSTRA Bappeda dan Litbang berdasarkan permasalahan pelayanan Bappeda dan Litbang.

Bab IV TUJUAN DAN SASARAN

Pada bagian ini menjelaskan tujuan dan sasaran jangka menengah Bappeda dan Litbang.

Bab V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini menjelaskan tentang strategi dan kebijakan jangka menengah Bappeda dan Litbang.

Bab VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bab ini menjelaskan rencana program, kegiatan dan Sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Bab VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini menjelaskan indikator kinerja Bappeda dan Litbang yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Bappeda dan Litbang dalam tiga tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kota Pangkalpinang.

Bab VIII PENUTUP

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Rencana Strategis Bappeda dan Litbang.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah

Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Pangkalpinang merupakan organisasi perangkat daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris daerah. Bappeda dan Litbang Kota Pangkalpinang dibentuk sebagai bagian dari organisasi Pemerintah Kota Pangkalpinang pada tahun 1981 dengan Keputusan Walikotamadya KDH Tingkat II Nomor 149/KPTS/IX/1981, yang telah mengalami beberapa penyesuaian sejak diberlakukannya otonomi daerah.

Struktur organisasi merupakan hal yang penting dalam melaksanakan program dan kegiatan pada suatu instansi pemerintah. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, berdasarkan Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 51 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unsur Penunjang Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2021 Nomor 51), menjelaskan bahwa "Bappeda dan Litbang Kota Pangkalpinang mempunyai tugas pokok yaitu: "perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah berdasarkan atas desentralisasi dan tugas pembantuan". Bappeda dan Litbang Tipe B merupakan unsur penunjang perangkat daerah bidang Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan yang dipimpin oleh seorang Kepala Bappeda dan Litbang, mempunyai Tugas Dan Fungsi Serta Susunan Organisasi sebagai berikut:



Kepala Badan

Kepala Bappeda dan Litbang mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah;
- b. penetapan rencana strategis Bappeda dan Litbang untuk mendukung visi dan misi Kota Pangkalpinang dan kebijakan Walikota;
- c. pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Kota Pangkalpinang bidang Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah;
- d. penetapan rencana kerja Bappeda dan Litbang menurut skala prioritas dan mendistribusikannya kepada bawahan;
- e. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah;
- f. pelaksanaan perencanaan bidang Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah;
- g. pengkoordinasian perencanaan di bidang Ekonomi, Sosial, Budaya, Pemerintahan dan kerjasama pembangunan kota;
- h. pengkoordinasian perencanaan di bidang infrastruktur, pengembangan wilayah, sumber daya alam dan lingkungan hidup kota;
- i. pengkoordinasian dan pelaksanaan tugas dibidang Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah di lingkungan Kota termasuk dukungan dana, sarana dan prasarana Bappeda dan Litbang; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud Kepala Bappeda dan Litbang membawahi:

- a. Sekretaris
- b. Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan;



- c. Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur;
- d. Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- e. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretaris

Mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian pelayanan administratif dan fungsional kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Bappeda dan Litbang.

Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi kegiatan Bappeda dan Litbang;
- b. penyusunan rencana program dan anggaran Bappeda dan Litbang;
- c. penyelenggaraan urusan ketatausahaan rumah tangga, kepegawaian, hukum dan organisasi serta hubungan masyarakat Bappeda dan Litbang;
- d. penyelenggaraan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan dan pengelolaan sarana Bappeda dan Litbang; dan
- e. pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud Sekretaris membawahi Sub Bagian dan Sub Koordinator meliputi:

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- b. Sub Koordinator Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang bertanggung jawab kepada Sekretaris Bappeda dan Litbang.

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip dan dokumentasi serta pelayanan informasi Bappeda dan Litbang.

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian Bappeda dan Litbang;
- b. pelaksanaan pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan naskah dinas, penataan kearsipan, penyelenggaraan kerumahtanggaan, dan pengelolaan perlengkapan Bappeda dan Litbang;
- c. pelaksanaan administrasi kepegawaian yang meliputi perencanaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian (kenaikan gaji berkala, cuti, disiplin, pengembangan, dan kesejahteraan pegawai);
- d. pengelolaan dan pemeliharaan serta pelaporan barang milik/kekayaan daerah lingkup Bappeda dan Litbang;
- e. pengelolaan jaringan informasi dan komunikasi Bappeda dan Litbang; penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pemberian pelayanan informasi kepada publik; pelaksanaan verifikasi bahan informasi publik; pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan; pemutakhiran informasi dan dokumentasi; penyediaan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat; penyampaian informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi secara berkala; dan
- f. pelaporan pelaksanaan kegiatan administrasi Umum dan Kepegawaian Bappeda dan Litbang.

Sub Koordinator Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan :

Sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang Sub Koordinator Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan yang bertanggung jawab kepada Sekretaris Bappeda dan Litbang.

Sub Koordinator Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan pemberian dukungan administrasi Bappeda dan Litbang mempunyai fungsi:

- a. penyusunan bahan perencanaan program dan kegiatan (Renstra, Renja, dan Perjanjian Kinerja, Rencana Umum Penganggaran, RKA/DPA Kesekretariatan) Bappeda dan Litbang;
- b. penyusunan bahan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan (Laporan Evaluasi Renja dan Renstra) Bappeda dan Litbang;
- c. penyusunan laporan akhir pelaksanaan program dan kegiatan (LAKIP, LPPD LKPJ) Bappeda dan Litbang;
- d. Pelaksanaan analisis keuangan Bappeda dan Litbang;
- e. perbendaharaan, verifikasi, akuntansi, monitoring evaluasi anggaran, Bappeda dan Litbang;
- f. pelaporan keuangan (Semesteran dan Akhir Tahun) Bappeda dan Litbang;
- g. pelaksanaan administrasi pengelolaan barang milik/kekayaan Bappeda dan Litbang; dan
- h. pelaporan pelaksanaan kegiatan Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan.

Bidang Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan yang bertanggung jawab kepada Kepala Bappeda dan Litbang.

Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Bappeda dan Litbang.

Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan mempunyai fungsi:



- a. penyusunan program kerja dan kegiatan Bidang;
- b. perumusan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan ekonomi makro daerah;
- c. pengoordinasian dan sinkronisasi data dan informasi kerangka ekonomi makro daerah;
- d. pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan;
- e. pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan;
- f. pengoordinasian pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD, RPJPD dan RPJMD;
- g. penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan RKPD, RPJMD dan RPJPD;
- h. pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah;
- i. pengidentifikasian permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
- j. pengelolaan hasil analisis hasil evaluasi untuk penyiapan laporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- k. penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan membawahi 3 (tiga) Sub Koordinator meliputi:

- a. Sub Koordinator Perencanaan dan Pendanaan;
- b. Sub Koordinator Data dan Informasi; dan
- c. Sub Koordinator Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan.

Sub Koordinator Perencanaan dan Pendanaan sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang Sub Koordinator Perencanaan dan Pendanaan yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Bappeda dan Litbang.



Sub Koordinator Perencanaan dan Pendanaan mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di lingkup Perencanaan dan Pendanaan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sub Koordinator Perencanaan dan Pendanaan mempunyai fungsi:

- a. menyiapkan bahan dan data analisis dan perumusan perencanaan dan penganggaran pembangunan ekonomi makro daerah;
- b. menyiapkan bahan dan data analisis kerangka ekonomi makro daerah;
- c. mengoordinasikan dan sinkronisasi analisis perencanaan dan pengembangan pendanaan pembangunan daerah, termasuk juga kebijakan keuangan daerah;
- d. mengoordinasikan pagu indikatif pembangunan daerah;
- e. mengoordinasikan dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model kewilayahan dan konektivitas serta kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
- f. menyiapkan bahan, data dan teknis pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan RKPD, RPJMD, RPJPD;
- g. mengolah bahan dan data penyusunan dokumen perencanaan pembangunan RKPD, RPJMD, RPJPD; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas fungsinya.

Sub Koordinator Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang Sub Koordinator Data dan Informasi yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan.

Sub Koordinator Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di lingkup Data dan Informasi mempunyai fungsi:

- a. melakukan pengumpulan data pembangunan daerah melalui survei untuk mengetahui perkembangannya;
- b. mengelola data pembangunan daerah sesuai jenisnya sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan daerah;



- c. mengelola hasil analisis atas hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- d. menyusun hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah;
- e. menyusun rencana kegiatan pengolahan data sesuai kebutuhan sebagai acuan pelaksanaan tugas unit terkait;
- f. menyajikan data pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi;
- g. melakukan pengamanan data hasil pembangunan daerah melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
- h. mengoordinasikan pendataan dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- i. menyusun laporan hasil pelaksanaan pembangunan daerah secara periodik sebagai bahan evaluasi;
- j. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;



- k. mengoordinasikan pelaksanaan tugas kepala bidang melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
- l. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
- m. melakukan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

Sub Koordinator Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang Sub Koordinator Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan.

Sub Koordinator Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di lingkup Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Koordinator Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi:

- a. menghimpun bahan kebijakan teknis sistem evaluasi pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menyiapkan bahan pengembangan sistem dan prosedur evaluasi, pengendalian dan pelaporan kegiatan terhadap pengendalian, perumusan kebijakan perencanaan dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah;
- c. mengoordinasikan evaluasi, pengendalian dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- d. melaksanakan pengendalian melalui pemantauan, supervise dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
- e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah di bidang pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- f. melaksanakan evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan secara bulanan, triwulan, semester, dan tahunan untuk menjadi bahan penyusunan program pembangunan daerah selanjutnya;



- g. menghimpun data hasil evaluasi pembangunan daerah sesuai program/kegiatan sebagai bahan penyusunan laporan;
- h. membuat laporan hasil evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan daerah sebagai bahan penilaian;
- i. menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan daerah;
- j. menindaklanjuti laporan hasil evaluasi secara berjenjang sebagai bahan penyusunan program lanjutan sebagai bahan penyusunan program lanjutan tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi;
- k. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
- l. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala bidang melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
- m. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur

Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur yang bertanggung jawab kepada Kepala Bappeda dan Litbang.

Kepala Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Bappeda dan Litbang.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja dan kegiatan bidang;



- b. pengendalian teknis pelaksanaan analisis dan kebijakan umum perencanaan pembangunan;
- c. penyusunan strategi pembangunan, arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan dan pendanaan perencanaan pembangunan;
- d. pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- e. penyiapan bahan musrenbang dan tindak lanjut RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
- f. pengkoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
- g. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
- h. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten/kota; pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi
- i. kegiatan Kementrian/Lembaga di kabupaten/kota;
- j. pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
- k. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah;
- l. perumusan indikasi rencana program dan kegiatan strategis yang menjadi target pencapaian perencanaan pembangunan;
- m. pembinaan dan fasilitasi teknis penyusunan perencanaan pembangunan;
- n. pengoordinasian dan sinkronisasi program dan kegiatan pembangunan;
- o. penelaahan dan penyelarasan usulan rencana program dan kegiatan pembangunan;
- p. pengawasan dan evaluasi tingkat capaian perencanaan program pembangunan; dan
- q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud Kepala Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur membawahi 3 (tiga) Sub Koordinator meliputi:



- a. Sub Koordinator Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- b. Sub Koordinator Perekonomian dan Sumber Daya Alam; dan
- c. Sub Koordinator Infrastruktur dan Kewilayahan.

Sub Koordinator Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

sebagaimana dimaksud a dipimpin oleh seorang Sub Koordinator Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur.

Sub Koordinator Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di lingkup Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Koordinator Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai fungsi:

- a. menyusun dan menganalisis data dan informasi pembangunan sebagai bahan perumusan kebijakan umum perencanaan;
- b. menyusun rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- d. menyiapkan bahan dan data pelaksanaan musrenbang dan tindak lanjut RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
- e. melaksanakan pelayanan administrasi perencanaan pembangunan daerah tahunan, pembangunan daerah jangka menengah dan pembangunan daerah jangka panjang di bidang perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia ;
- f. melaksanakan fasilitasi perencanaan pembangunan daerah di bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- g. menyusun kerangka rencana pembiayaan pembangunan daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- h. menyiapkan data dan informasi serta teknis koordinasi perencanaan program dan kegiatan pembangunan dengan perangkat daerah atau instansi terkait lainnya;



- i. mengumpulkan, menyusun, dan menganalisis rencana kegiatan yang mengindikasikan program strategis pencapaian target perencanaan pembangunan;
- j. menyiapkan bahan dan data serta teknis pelaksanaan supervisi dan konsultasi usulan program dan kegiatan pembangunan;
- k. menyiapkan bahan dan data serta teknis pelaksanaan monitoring dan evaluasi tingkat capaian perencanaan program pembangunan; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas fungsinya.

Sub Koordinator Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang Sub Koordinator Perekonomian dan Sumber Daya Alam yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur.

Sub Koordinator Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di lingkup Perekonomian dan Sumber Daya Alam.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Koordinator Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai fungsi:

- a. menyusun perumusan kebijakan teknis di bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- b. menyusun rencana program dan rencana kerja anggaran bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- c. mengkoordinasi pelaksanaan tugas di bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- d. melaksanakan pelayanan administrasi dan teknis perencanaan pembangunan daerah tahunan, jangka menengah dan jangka panjang di bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- e. melaksanakan fasilitasi perencanaan pembangunan daerah di bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- f. menyusun kerangka rencana pembiayaan pembangunan daerah bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;



- g. menyiapkan data dan informasi di bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- h. melaksanakan pembinaan, pemantauan pengawasan dan pengendalian kegiatan Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.

Sub Koordinator Infrastruktur dan Kewilayahan

sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang Sub Koordinator Infrastruktur dan Kewilayahan yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur.

Sub Koordinator Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di lingkup Seksi Infrastruktur dan Kewilayahan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Koordinator Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai fungsi:

- a. melaksanakan penyusunan kebijakan teknis di bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- b. melaksanakan penyusunan program dan rencana kerja anggaran bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- c. mengkoordinasi pelaksanaan tugas di bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- d. melaksanakan pelayanan administrasi perencanaan pembangunan daerah tahunan, pembangunan daerah jangka menengah dan pembangunan daerah jangka Panjang di bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- e. melaksanakan fasilitasi perencanaan pembangunan daerah di bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- f. menyusun kerangka rencana pembiayaan pembangunan daerah bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- g. menyusun kebijakan dan pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh andalan, perbatasan dan pesisir;
- h. menyajikan data dan informasi di bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;



- i. melaksanakan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- k. menyusun laporan kinerja program bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- l. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas fungsinya.

Bidang Pengembangan dan Penelitian

Bidang Pengembangan dan Penelitian sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Pengembangan dan Penelitian yang bertanggung jawab kepada Kepala Bappeda dan Litbang. Kepala Bidang Pengembangan dan Penelitian mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi bidang Pengembangan dan Penelitian kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Bappeda dan Litbang.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, **Kepala Bidang Pengembangan dan Penelitian** mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan pemerintah kabupaten/kota;
- b. penyusunan perencanaan program dan anggaran penelitian dan pengembangan pemerintahan kabupaten/kota;
- c. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di pemerintahan kabupaten/kota;
- d. pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan kabupaten/kota;
- e. pelaksanaan dan fasilitasi inovasi daerah;
- f. penyusunan dan pelaksanaan kajian kebijakan nasional yang berdampak pada daerah;
- g. penyusunan dan pelaksanaan kajian dan analisis daerah mengenai isu-isu strategis sebagai bahan penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
- h. pengoordinasian dan kerja sama penelitian dan pengembangan dengan lembaga atau instansi terkait;



- i. penelitian, pengkajian, dan pengembangan perencanaan sumber daya alam dan pembangunan;
- j. penelitian, pengkajian, dan pengembangan perencanaan pembangunan perekonomian, kemasyarakatan, pemerintahan, infrastruktur, dan kewilayahan;
- k. penelitian, pengkajian, dan pengembangan informasi dan pemanfaatan teknologi;
- l. pengendalian dan evaluasi hasil penelitian, pengkajian, dan perencanaan pembangunan daerah; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Pengembangan dan Penelitian membawahi 3 (tiga) Sub Koordinator meliputi:

- a. Sub Koordinator Sosial dan Pemerintahan;
- b. Sub Koordinator Ekonomi dan Pembangunan; dan
- c. Sub Koordinator Inovasi dan Teknologi.

Sub Koordinator Sosial dan Pemerintahan

sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang Sub Koordinator Sosial dan Pemerintahan yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan.

Sub Koordinator Sosial dan Pemerintahan mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di lingkup Sosial dan Pemerintahan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Koordinator Sosial dan Pemerintahan mempunyai fungsi:

- a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang social dan pemerintahan, meliputi aspek-aspek, Sosial, Budaya, Kependudukan dan Pemberdayaan Masyarakat serta penyelenggaraan Pemerintahan dan mengkaji peraturan;
- b. mengkoordinasikan teknis kegiatan penelitian dan Kerjasama penelitian dengan Lembaga atau instansi terkait;



- c. menyiapkan bahan pelaksanaan program dan kegiatan;
- d. menyiapkan bahan dan data monitoring dan evaluasi hasil penelitian, kajian, dan pengembangan;
- e. mengolah bahan dan data hasil analisis daerah sebagai bahan penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
- f. menyusun kerangka studi, instrument analisis, dan melakukan penelitian lapangan; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas fungsinya.

Sub Koordinator Ekonomi dan Pembangunan

sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang Sub Koordinator Ekonomi dan Pembangunan yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan.

Sub Koordinator Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di lingkup Ekonomi dan Pembangunan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Koordinator Ekonomi dan Pembangunan mempunyai fungsi:

- a. menyiapkan bahan pelaksanaan program dan kegiatan;
- b. menyiapkan bahan dan data monitoring dan evaluasi hasil penelitian, kajian dan pengembangan;
- c. mengkoordinasikan teknis kegiatan penelitian serta kerja sama penelitian dengan Lembaga atau instansi terkait;
- d. menghimpun dan mengolah data analisis daerah sebagai bahan penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
- e. mengolah laporan hasil penelitian, kajian dan pengembangan sebagai bahan pengambilan kebijakan; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Sub Koordinator Inovasi dan Teknologi

sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang Sub Koordinator Inovasi dan Teknologi yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan. Sub Koordinator Inovasi dan Teknologi mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di lingkup Inovasi dan Teknologi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Koordinator Inovasi dan Teknologi mempunyai fungsi:

- a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di bidang Inovasi dan Pengembangan Teknologi serta Diseminasi Kelitbangan;
- b. menyiapkan bahan rancangan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif meliputi aspek-aspek Inovasi dan Pengembangan Teknologi, Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi serta Diseminasi Kelitbangan;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang inovasi dan teknologi meliputi aspek-aspek Inovasi dan Pengembangan Teknologi, Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi serta Diseminasi Kelitbangan;
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan dan fasilitasi di bidang inovasi dan teknologi meliputi aspek-aspek Inovasi dan Pengembangan Teknologi, Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi serta Diseminasi Kelitbangan;
- e. menyiapkan bahan, strategi, dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi meliputi aspek-aspek Inovasi dan Pengembangan Teknologi, Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi serta Diseminasi Kelitbangan;
- f. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi meliputi aspek-aspek Inovasi dan Pengembangan Teknologi, Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi serta Diseminasi Kelitbangan;



- g. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi meliputi aspek-aspek Inovasi dan Pengembangan Teknologi, Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi serta Diseminasi Kelitbangan;
- h. menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan diseminasi hasil-hasil kelitbangan; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Struktur Organisasi

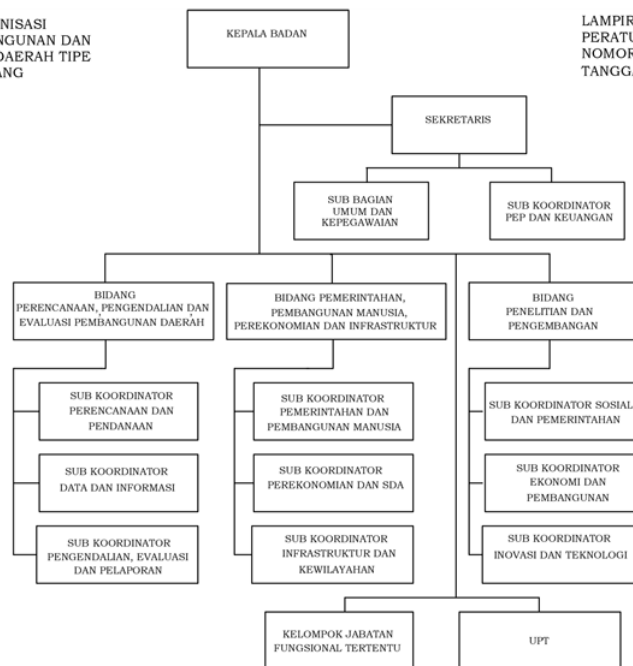
Bappeda dan Litbang Kota Pangkalpinang merupakan Perangkat Daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah yang dipimpin oleh Kepala Bappeda dan Litbang. Berdasarkan Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 51 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unsur Penunjang Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2021 Nomor 51), maka Struktur Organisasi Bappeda dapat dilihat pada Bagan 2.1 sebagai berikut

Bagan 2.1

Struktur Organisasi Bappeda Dan Litbang Kota Pangkalpinang

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN
PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH TIPE
B KOTA PANGKALPINANG

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG
NOMOR 51 TAHUN 2021
TANGGAL 28 DESEMBER 2021



Sumber : Peraturan Walikota No 51 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unsur Penunjang Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang

2.2 Sumber Daya Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Pangkalpinang

Dalam menunjang pelaksanaan program dan kegiatan Bappeda dan Litbang Kota Pangkalpinang didukung dengan sumberdaya yang terdiri dari 2 (dua) macam yaitu:

- Sumber Daya Manusia, berdasarkan tingkat pendidikan, jenis pendidikan yang diikuti baik pendidikan formal maupun non formal merupakan aparatur pemerintah yang meliputi Kepala Badan, Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang serta staf yang melaksanakan kegiatan Bappeda dan Litbang.

Berdasarkan data terakhir per 31 Desember Tahun 2022 jumlah pegawai tetap (PNS) Bappeda dan Litbang sebanyak 34 (tiga puluh empat) orang dengan perincian pengisian jabatan eselon, pendidikan dan golongan dapat dilihat pada **Tabel 2.2.1** s.d **Tabel 2.2.2**.

TABEL 2.2.1
PENGISIAN JABATAN STRUKTURAL BAPPEDA dan LITBANG
KOTA PANGKALPINANG

ESELON	JUMLAH	TERISI	KEKURANGAN
II	1	1	0
III	4	4	0
IV	11	11	0
JUMLAH	16	16	0

Sumber : Daftar Urut Kepangkatan Subbag Umum dan Kepegawaian Bappeda dan Litbang Kota Pangkalpinang Tahun 2022

Pegawai Bappeda dan Litbang Kota Pangkalpinang tercatat sebanyak 34 orang, terdiri dari 13 orang berpendidikan master/S2; 12 orang berpendidikan sarjana/S1; 9 orang berpendidikan Non S1 (DIII dan Diploma). Postur dan rincian data pegawai dapat dilihat pada Tabel 2.2.2

Tabel 2.2.2
Komposisi Pegawai Bappeda dan Litbang Tahun 2022
Berdasarkan Pendidikan

NO		JABATAN	TINGKAT PENDIDIKAN								
			S3		S2		S1		NON S1		JUM LAH
			L	P	L	P	L	P	L	P	
ESELON	1	Eselon II			1						1
	2	Eselon III			4						4
	3	Eselon IV					1				1
FUNGSIONAL TERTENTU	4	Sub Koordinator			6	2	1	1		0	10

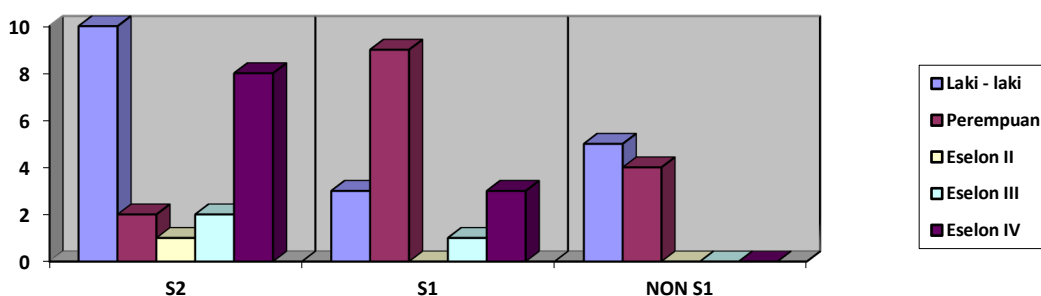


NO		JABATAN	TINGKAT PENDIDIKAN								
			S3		S2		S1		NON S1		JUM LAH
			L	P	L	P	L	P	L	P	
	5	fungsional Perencanaan Pertama						3			3
FUNGSIONAL UMUM	6	Bendahara								1	1
	7	Pengelola Barang Milik Negara								1	1
	8	Analisis Perencanaan, Evaluasi Pelaporan dan Keuangan						1			1
	9	Analisis Infrastruktur						1			1
	10	Analisis Lingkungan						1			1
	11	Calon teknik tata bangunan dan perumahan terampil							2		2
	12	Pengolah data							2		2
	13	Pengolah data dan Laporan								1	1
	14	Administrasi surat							1		1
	15	Pelaksana					1				4
	16	Analisis Program dan Pembangunan						1			1
	17	Analisis Sosial Budaya						1			1
	18	Pengelola Keuangan							1		1
		JUMLAH	0	0	11	2	3	9	5	4	34

Sumber : Daftar Urut Kepangkatan Subbag Umum dan Kepegawaian Bappeda dan Litbang Kota Pangkalpinang Tahun 2022

Gambar 1

Data Kepegawaian Bappeda dan Litbang Kota Pangkalpinang



Sumber : Daftar Urut Kepangkatan Subbag Umum dan Kepegawaian Bappeda dan Litbang Kota Pangkalpinang Tahun 2022

TABEL 2.2.3

JUMLAH PNS DAN CPNS BERDASARKAN GOLONGAN KEPANGKATAN

GOLONGAN	JUMLAH
IV/b	1
IV/a	6
III/d	7
III/c	3
III/b	4
III/a	7
II/d	3
II/c	2
II/b	0
II/a	1
Jumlah	34

Sumber : Daftar Urut Kepangkatan Subbag Umum dan Kepegawaian Bappeda dan Litbang Kota Pangkalpinang Tahun 2022

- b. Penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan kegiatan perencanaan seperti gedung beserta ruang rapat yang memadai, fasilitas komputer beserta jaringan internet, meja, kursi,

mobil dinas Kepala Badan dan mobil operasional, peralatan kantor dan sumber daya pendukung lainnya.

Tabel 2.2.4
Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi
di Bappeda dan Litbang Kota Pangkalpinang Tahun 2022

No	Aset / Sarana dan Prasarana	Jumlah	Kondisi
1.	Tanah dan Bangunan Kantor Pemerintah	1	Baik
2.	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	4	Baik
3.	Mobil Dinas	1	Baik
4.	Sepeda Motor	7	Baik
5.	Lemari Besi	14	Baik
6.	Rak Besi/Metal	1	Kurang Baik
7.	Rak Kayu	2	Baik
8.	Filling Besi/Metal	4	Kurang Baik
9.	Filling Besi/Metal	9	Baik
10.	Brand Kas	1	Baik
11.	Lemari Kaca	5	Kurang Baik
12.	Lemari Kaca	6	Baik
13.	Alat Penghancur Kertas	2	Baik
14.	White Board	2	Baik
15.	Alat Kantor Lainnya	8	Baik
16.	Alat Kantor Lainnya	4	Kurang Baik
17.	Genset	2	Baik
18.	Kursi Roda	1	Rusak Berat
19.	Kursi Roda	12	Baik
20.	Meja Rapat	17	Baik
21.	Kursi Rapat	1	Kurang Baik
22.	Kursi Rapat	83	Baik
23.	Kursi Putar	6	Baik
24.	Sofa	2	Baik
25.	Kursi Tunggu	1	Baik
26.	Tempat Tidur Busa (Springbed)	1	Baik
27.	Kursi Kerja	15	Baik
28.	AC Unit	15	Baik
29.	AC Unit	1	Kurang Baik
30.	Dispenser	1	Baik
31.	Rak Piring	1	Baik
32.	Televisi	1	Rusak Berat
33.	Televisi	1	Baik
34.	Sound System	1	Baik
35.	Mesin Air	1	Baik
36.	Server Komputer	1	Baik
37.	PC Unit/Komputer PC	3	Rusak Berat
38.	PC Unit/Komputer PC	5	Kurang Baik
39.	PC Unit/Komputer PC	25	Baik
40.	Laptop	2	Rusak Berat



No	Aset / Sarana dan Prasarana	Jumlah	Kondisi
41.	Laptop	3	Kurang Baik
42.	Laptop	13	Baik
43.	Personal Komputer Lain	1	Rusak Berat
44.	Personal Komputer Lain	1	Kurang Baik
45.	Personal Komputer Lain	3	Baik
46.	Printer	4	Kurang Baik
47.	Printer	50	Baik
48.	UPS	2	Rusak Berat
49.	UPS	20	Baik
50.	Hard Disk External	2	Rusak Berat
51.	Hard Disk External	1	Kurang Baik
52.	Hard Disk External	2	Baik
53.	Modem	2	Baik
54.	Peralatan Jaringan Lain-Lain	3	Baik
55.	Meja Kerja	7	Kurang Baik
56.	Meja Kerja	6	Baik
57.	Karpet	3	Baik
58.	Vertical Blind	1	Baik
59.	Vacuum	1	Baik
60.	Camera+Attachment	2	Baik
61.	Proyektor+Attachment	2	Baik
62.	Layar Proyektor	1	Baik
63.	Camera Electronic	1	Rusak Berat
64.	Camera Electronic	1	Baik
65.	CCTV	16	Baik
66.	Rak Terminal Vencing	1	Kurang Baik
67.	Handy Talky	1	Baik
68.	Wireless	1	Kurang Baik
69.	Wireless	1	Baik
70.	Antena MF/MW Portable	1	Baik
71.	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	Baik
72.	Bangunan Gedung Kantor Lain-Lain	1	Baik
73.	Bangunan Gudang Tertutup Pemanen	1	Baik
74.	Bangunan Gudang Lain-Lain	1	Baik
75.	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	1	Baik
76.	Gedung Garasi/Pool Permanen	2	Baik
77.	Bangunan Gedung Garasi/Pool Lain-Lain	1	Baik
78.	Konstruksi Pagar	2	Baik
79.	Rumah Negara Golongan I Type C Permanen	1	Baik
80.	Rumah dinas	1	Baik
81.	Instalasi Listrik	1	Baik
82.	Jaringan internet	1	Baik
83.	Ilmu Pengetahuan umum	1	Baik
84.	Ensyclopedia, Kamus, Buku Referensi	22	Baik
85.	Buku Umum Lain-Lain	14	Baik

Sumber : Bendahara Barang Bappeda dan Litbang Kota Pangkalpinang Tahun 2022



2.3 Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Pangkalpinang

Dalam Sub Bab Kinerja Pelayanan Bappeda dan Litbang Kota Pangkalpinang akan dibahas antara lain:

1. Kinerja pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah berdasarkan capaian pelaksanaan program dan kegiatan.

Kinerja Bappeda dan Litbang pada Renstra Tahun 2018-2023. Sejak tahun 2020, Bappeda dan Litbang Kota Pangkalpinang melaksanakan 2 (dua) urusan yaitu urusan perencanaan pembangunan dan kelitbangan. Adapun program dan kegiatan serta pencapaian terhadap realisasi kinerja pelayanan pada periode 2018-2023 sebagaimana diuraikan pada tabel berikut:



Tabel 2.3.1
PENCAPAIAN REALISASI KINERJA PELAYANAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA PANGKALPINANG

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-				
				2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
	dokumen hasil laporan Sistem informasi pembangunan Daerah (SIPD) Kota Pangkalpinang			1 dokumen					1 dokumen					100 %				
	jenis data elektronik tentang ekonomi sosial dan budaya di Kota Pangkalpinang yang tersedia			1 data/ informasi					1 data/ informasi					100 %				
	dokumen data infrastruktur secara akurat yang tersedia			1 dokumen					1 dokumen					100 %				
	dokumen data SDA dan Lingkungan Hidup secara akurat yang tersedia			1 dokumen					1 dokumen					100 %				
	dokumen statistik strategis infrastruktur daerah yang dipublikasikan			1 dokumen					1 dokumen					100 %				
	Pelaksanaan koordinasi forum Kota sehat pangkalpinang			1 kali					1 kali					100 %				
	forum kerja sama yang diikuti			3 forum					3 forum					100 %				
	pelaksanaan rapat koordinasi Kepala Bappeda seprovinsi Kepulauan Bangka Belitung yang tersedi			1 kali					1 kali					100 %				



No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-				
				2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
	jumlah dokumen hasil koordinasi kota layak anak			1 dokumen					1 dokumen					100 %				
	pelaksanaan Musrenbang RPJMD 2018-2023			1 kali					1 kali					100 %				
	dokumen perencanaan jangka pendek yang tersusun			1 dokumen					1 dokumen					100 %				
	pelaksanaan Musrenbang RKP			1 kali					1 kali					100 %				
	dokumen data/informasi spasial perencanaan pembangunan yang tersedia			1 dokumen					1 dokumen					100 %				
	dokumen LAKIP Kota Pangkalpinang			1 dokumen					1 dokumen					100 %				
	Dokumen Laporan hasil Monev dan evaluasi program strategis Walikota yang disusun			1 dokumen					1 dokumen					100 %				
	Dokumen Laporan hasil Monev, Pengendalian dan Pelaporan Renbang Daerah yang tersedia			4 laporan					4 laporan					100 %				
	Laporan Monev, Pengendalian dan Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat			1 dokumen					1 dokumen					100 %				
	jumlah dokumen laporan hasil monitoring pembangunan infrastruktur			1 dokumen					1 dokumen					100 %				
	aparatur yang mengikuti Workshop Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah			65 orang					65 orang					100 %				



No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-				
				2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
	jumlah peserta yang mengikuti Workshop			70 orang					70 orang					100 %				
	Jumlah dokumen program penataan dan pelestarian kota pusaka (P3KP) yang tersedia			1 dokumen					1 dokumen					100 %				
	jumlah dokumen laporan hasil terlaksananya pendampingan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)			1 dokumen					1 dokumen									
	ketersediaan data elektronik perencanaan jangka pendek di Pemerintah Kota Pangkalpinang			1 ketersediaan					1 ketersediaan					100 %				
	dokumen hasil Kelompok Kerja pengembangan kota hijau (P2KH) yang tersedia			1 dokumen					1 dokumen					100 %				
	dokumen Peraturan Daerah tentang RPJMD Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023 yang disusun			1 dokumen					1 dokumen					100 %				
	Dokumen Laporan Hasil Analisa Capaian Sasaran Pembangunan yang tersedia			1 dokumen					1 dokumen					100 %				
	ketersediaan dokumen perencanaan jangka pendek perubahan yang tersusun			1 ketersediaan					1 ketersediaan					100 %				
	dokumen hasil Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (Pokja AMPL) yang tersedia			1 dokumen					1 dokumen					100 %				
	media elektronik perangkat daerah yang dikelola			1 media elektronik					1 media elektronik					100 %				



No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-				
				2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
	dokumen hasil evaluasi RKPD			1 dokumen					1 dokumen					100 %				
	dokumen Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus yang disusun			1 dokumen					1 dokumen					100 %				
	Jumlah dokumen hasil kajian infrastruktur Kota Pangkalpinang yang disusun			2 dokumen					2 dokumen					100 %				
	Jumlah masterplan kawasan dan maket kawasan disusun			1 master plan/maket					1 master plan/maket					100 %				
	laporan hasil koordinasi penanggulangan kemiskinan			1 laporan					1 laporan					100 %				
	dokumen Laporan hasil koordinasi pencegahan dan pemberantasan korupsi yang Dihasilkan			1 dokumen					1 dokumen					100 %				
	dokumen hasil laporan Sistem informasi pembangunan Daerah (SIPD) Kota Pangkalpinang				1 dokumen					1 dokumen					100 %			
	Video profil Kota Pangkalpinang				1 video					1 video					100 %			
	Jenis data/informasi elektronik sosial budaya yang tersedia				1 data/ informasi elektronik					1 data/ informasi elektronik					100 %			
	dokumen data perencanaan pembangunan bidang ekonomi				1 dokumen					1 dokumen					100 %			
	dokumen data infrastruktur secara akurat yang tersedia				1 dokumen					1 dokumen					100 %			
	dokumen data set Lingkup SDA dan Lingkungan Hidup secara akurat yang tersedia				1 dokumen					1 dokumen					100 %			
	dokumen statistik strategis infrastruktur daerah yang dipublikasikan				1 dokumen					1 dokumen					100 %			



RENSTRA BAPPELITBANGDA KOTA PANGKALPINANG
TAHUN 2024-2026

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-				
				2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
	dokumen koordinasi forum Kota sehat pangkalpinang				1 dokumen					1 dokumen					100 %			
	dokumen hasil koordinasi stunting Kota Pangkalpinang				1 dokumen					1 dokumen					100 %			
	dokumen perencanaan jangka pendek yang tersusun				1 dokumen					1 dokumen					100 %			
	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD tingkat Kota				1 kali					1 kali					100 %			
	dokumen perencanaan pembangunan yang tersedia				1 dokumen					1 dokumen					100 %			
	dokumen LAKIP Kota Pangkalpinang				1 dokumen					1 dokumen					100 %			
	Kategori penghargaan perencanaan pembangunan				3 kategori					3 kategori					100 %			
	Dokumen Laporan hasil Monev, Pengendalian dan Pelaporan Renbang Daerah yang tersedia				1 dokumen					1 dokumen					100 %			
	Laporan Monev, Pengendalian dan Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat				1 dokumen					1 dokumen					100 %			
	aparatur yang mengikuti workshop penyusunan Lakip				62 orang					62 orang					100 %			
	aparatur yang mengikuti workshop perencanaan pembangunan daerah				62 orang					62 orang					100 %			
	dokumen hasil koordinasi dan fasilitasi pokja P2KP yang tersedia				1 dokumen					1 dokumen					100 %			
	jumlah dokumen laporan hasil terlaksananya pendampingan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)				1 dokumen					1 dokumen					100 %			



**RENSTRA BAPPETBANGDA KOTA PANGKALPINANG
TAHUN 2024-2026**

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-				
				2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
	dokumen hasil Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (Pokja AMPL) yang tersedia				1 dokumen					1 dokumen					100 %			
	Dokumen hasil koordinasi dan fasilitasi Pembangunan Perumahan, Permukiman, Air minum dan Sanitasi (Pokja PPAS)				1 dokumen					1 dokumen					100 %			
	jenis data elektronik perencanaan jangka pendek yang tersedia				1 jenis					1 jenis					100 %			
	dokumen laporan RPJMD 2018-2023				1 dokumen					1 dokumen					100 %			
	dokumen perubahan perencanaan jangka pendek yang tersusun				1 dokumen					1 dokumen					100 %			
	media elektronik perangkat daerah yang dikelola				1 media elektronik					1 media elektronik					100 %			
	dokumen hasil evaluasi RKPD yang tersusun				1 dokumen					1 dokumen					100 %			
	dokumen Pelaksanaan Pengusulan Dana DAK				1 dokumen					1 dokumen					100 %			
	laporan hasil koordinasi penanggulangan kemiskinan				1 laporan					1 laporan					100 %			
	dokumen Koordinasi Kota Layak Anak Kota pangkalpinang				1 dokumen					1 dokumen					100 %			
	dokumen Koordinasi Pengarustamaan Gender Kota Pangkalpinang				1 dokumen					1 dokumen					100 %			
	Laporan Data/Informasi Pemerintah				1 laporan					1 laporan					100 %			



No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-				
				2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
	Laporan Monev, Pengendalian dan Pelaksanaan pembangunan wilayah kecamatan dan Kelurahan				1 laporan					1 laporan					100 %			
	Dokumen Laporan Evaluasi Rencana Kerja OPD Dalam Setiap Triwulan				1 dokumen					1 dokumen					100 %			
	dokumen hasil laporan evaluasi penggunaan Dana DAK				1 dokumen					1 dokumen					100 %			
	dokumen hasil Renstra OPD				1 dokumen					1 dokumen					100 %			
	Aparatur Yang Mengikuti Bimtek Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi				1 dokumen					1 dokumen					100 %			
	dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi serta fasilitasi pembangunan infrastruktur				1 dokumen					1 dokumen					100 %			
	dokumen masterplan kawasan				1 dokumen					1 dokumen					100 %			
	dokumen hasil Sinkronisasi Perencanaan SDA dan LH				1 dokumen					1 dokumen					100 %			
	dokumen hasil Sinkronisasi Perencanaan Pengembangan Wilayah				1 dokumen					1 dokumen					100 %			
	Jumlah dokumen hasil kajian infrastruktur Kota Pangkalpinang				1 dokumen					1 dokumen					100 %			
	Jumlah dokumen jurnal penelitian daerah yang tersusun				1 dokumen					1 dokumen					100 %			
	Jumlah fasilitasi sistem inovasi daerah yang diakomodir				1 sistem					1 sistem					100 %			



No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-				
				2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
	Jumlah laporan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah					1 laporan					1 laporan					100 %		
	Jumlah Profil Pembangunan Kota Pangkalpinang					1 laporan					1 laporan					100 %		
	Jumlah koodinasi pengendalian perencanaan pelaksanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan					4 kali					4 kali					100 %		
	Jumlah Laporan Dalev yang tersusun					1 dokumen					1 dokumen					100 %		
	Jumlah dokumen hasil koordinasi perencanaan pembangunan daerah bid. Pemerintahan					1 dokumen					1 dokumen					100 %		
	Jumlah dokumen hasil koordinasi perencanaan pembangunan daerah bid. Pembangunan Manusia					1 dokumen					1 dokumen					100 %		
	Jumlah dokumen hasil koordinasi perencanaan pembangunan daerah OPD Urusan Bidang Perekonomian					1 dokumen					1 dokumen					100 %		
	Jumlah dokumen hasil koordinasi perencanaan pembangunan daerah OPD Urusan Bidang SDA (Sumber Daya Alam)					1 dokumen					1 dokumen					100 %		
	Jumlah dokumen hasil koordinasi perencanaan pembangunan daerah OPD Urusan Bid. Infrastruktur					1 dokumen					1 dokumen					100 %		



No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-				
				2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
	Jumlah dokumen hasil koordinasi perencanaan pembangunan daerah OPD Urusan Bidang kewilayahan					1 dokumen					1 dokumen					100 %		
	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi					1 dokumen					1 dokumen					100 %		
	Jumlah dokumen Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi					1 dokumen					1 dokumen					100 %		
	Jumlah Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi					33 inovasi					33 inovasi					100 %		
	Jumlah disemenasi jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif					3 inovasi					3 inovasi					100 %		
	Jumlah disemenasi jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif					1 HKI					1 HKI					100 %		
	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik						1 berita acara					1 berita acara					100 %	
	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah						1 berita acara					1 berita acara					100 %	



No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-				
				2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan						7 usulan					7 usulan					100 %	
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)						30 dokumen					30 dokumen					100 %	
	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)						1 masukan					1 masukan					100 %	
	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi						1 orang					1 orang					100 %	
	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan						1 buku					1 buku					100 %	
	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola						1 dokumen					1 dokumen					100 %	
	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah						1 dokumen					1 dokumen					100 %	
	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan						5 laporan					5 laporan					100 %	



RENSTRA BAPPETITBANGDA KOTA PANGKALPINANG
TAHUN 2024-2026

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-				
				2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya						1 kerjasama					1 kerjasama					100 %	
	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah						5 laporan					5 laporan					100 %	
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)						1 dokumen					1 dokumen					100 %	
	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah						13 perangkat daerah					13 perangkat daerah					100 %	
	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pemerintahan						13 perangkat daerah					13 perangkat daerah					100 %	
	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan						1 laporan					1 laporan					100 %	
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)						1 dokumen					1 dokumen					100 %	
	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia						8 perangkat daerah					8 perangkat daerah					100 %	
	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia						10 perangkat daerah					10 perangkat daerah					100 %	



No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-				
				2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia						1 laporan					1 laporan					100 %	
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)						1 dokumen					1 dokumen					100 %	
	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian						5 perangkat daerah					5 perangkat daerah					100 %	
	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian						5 perangkat daerah					5 perangkat daerah					100 %	
	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/ Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian						1 laporan					1 laporan					100 %	
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)						1 dokumen					1 dokumen					100 %	
	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA						3 perangkat daerah					3 perangkat daerah					100 %	



No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-				
				2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA						3 perangkat daerah					3 perangkat daerah					100 %	
	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA						1 laporan					1 laporan					100 %	
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)						1 dokumen					1 dokumen					100 %	
	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur						4 perangkat daerah					4 perangkat daerah					100 %	
	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur						4 perangkat daerah					4 perangkat daerah					100 %	
	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur						1 laporan					1 laporan					100 %	
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)						1 dokumen					1 dokumen					100 %	

[illegible]



No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-				
				2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi						1 laporan					1 laporan					100 %	
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif						1 laporan					1 laporan					100 %	
	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan						1 laporan					1 laporan					100 %	
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual						1 laporan					1 laporan					100 %	



Anggaran dan Realisasi selama kurun waktu tahun 2019 – 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3.2
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA PANGKALPINANG

Program	Anggaran pada Tahun ke				Realisasi Anggaran pada Tahun ke				Persentase Realisasi Anggaran pada Tahun ke				Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran	Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Anggaran
	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022		
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1,736,577,000	1,250,407,969	-	-	1,484,206,086	1,179,197,471	-	-	85.47	94.31	-	-		
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	646,862,000	438,017,500	-	-	545,042,165	387,522,480	-	-	84.26	88.47	-	-		
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	40,000,000	-	-	-	33,984,000	-	-	-	84.96	-	-	-		
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	160,000,000	80,000,000	-	-	42,508,850	53,362,600	-	-	89.07	66.70	-	-		
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	49,052,500	10,156,000	-	-	46,286,700	10,156,000	-	-	94.36	100	-	-		
PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI	776,625,000	-	-	-	740,570,689	-	-	-	95.36	-	-	-		



PROGRAM KERJASAMA PEMBANGUNAN	515,000,000	-	-	-	266,732,488	-	-	-	51.79	-	-	-		
PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	4,498,982,500	-	-	-	3,766,303,726	-	-	-	83.71	-	-	-		
PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL DAN BUDAYA	120,000,000	-	-	-	107,097,700	-	-	-	89.25	-	-	-		
PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH	20,000,000	-	-	-	16,877,000	-	-	-	84.39	-	-	-		
PROGRAM KAJIAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN	439,800,000	-	-	-	405,614,484	-	-	-	92.23	-	-	-		
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	-	63,600,000	-	-	-	51,032,952	-	-	-	80.24	-	-		
PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN DATA / INFORMASI DAERAH	-	2,799,919,946	-	-	-	2,569,494,022	-	-	-	91.77	-	-		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			4,858,056,961	6,763,293,944	-	-	4,697,317,502	6,542,933,119			96.69	96.74		
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN	-	-	685,075,650	634,947,200	-	-	654,305,935	574,883,483			95.86	90.54		



**INSTRUMEN STRA BAPPELITBANGDA KOTA PANGKALPINANG
TAHUN 2024-2026**

DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH														
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	-	-	556,070,489	554,472,000	-	-	501,800,291	534,590,627			93.59	96.41		
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	-	-	1,157,401,800	1,363,423,600	-	-	1,075,414,146	1,242,268,256			85.37	91.11		

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dengan memperhatikan sumber daya yang dimiliki serta capaian kinerja pada tahun-tahun sebelumnya, tantangan yang dihadapi Bappeda dan Litbang Kota Pangkalpinang dan peluang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai institusi perencana adalah sebagai berikut :

2.4.1 Tantangan

Tantangan adalah situasi yang merupakan ancaman bagi organisasi yang datang dari luar organisasi (eksternal) dan dapat mengancam eksistensi organisasi di masa depan. Tantangan pengembangan pelayanan Bappeda dan Litbang Kota Pangkalpinang sebagai berikut:

1. Dinamika dan regulasi kebijakan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi terkait perencanaan pembangunan daerah
2. Tingkat pemahaman masyarakat terhadap mekanisme perencanaan pembangunan serta aspirasi dan tuntutan masyarakat yang semakin beragam
3. Perencanaan dan penganggaran dengan menganut system yang baik dan terencana
4. Perkembangan dan penanganan Kota Pangkalpinang beserta seluruh permasalahannya akibat dari pandemic covid-19

2.4.2 Peluang

Peluang adalah situasi atau kondisi yang merupakan peluang dari luar organisasi (eksternal) dan memberikan peluang berkembang bagi organisasi di masa depan. Peluang dalam pengembangan pelayanan Bappeda dan Litbang Kota Pangkalpinang sebagai berikut :

1. Tersedianya regulasi dan kebijakan yang mendukung perencanaan pembangunan daerah
2. Kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah
3. Perkembangan teknologi dan informasi yang sangat pesat
4. Tersedianya potensi sumber daya aparatur

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan di dalam proses penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Pangkalpinang, dalam hal ini untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan *akseptabilitas* prioritas pembangunan yang dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Melalui pengintegrasian kajian berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota secara umum dan dengan memperhatikan tantangan dan permasalahan mengacu pada hasil telaahan terhadap RPD Kota Pangkalpinang 2024-2026, RENSTRA PD, sebagaimana telah diuraikan dalam Bab II Gambaran Pelayanan PD, dapatlah disusun isu-isu strategis yang akan menjadi landasan penyusunan tujuan dan sasaran Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah sampai dengan tahun mendatang.

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 51 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unsur Penunjang Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2021 Nomor 51), Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan kebijakan teknis, koordinasi pembinaan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah berdasarkan atas desentralisasi dan tugas pembantuan.

Pada sub ini akan diuraikan identifikasi permasalahan yang harus dihadapi Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Badan Perencanaan
Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum Optimalnya Kualitas Perencanaan Pembangunan dan Penelitian	Ketersediaan data pendukung dalam menyusun dokumen perencanaan masih perlu di optimalkan	Data yang belum sesuai dengan kebutuhan perencanaan pembangunan (akurat dan valid)
	Belum optimalnya pengakomodiran usulan Musrenbang dan Pokir	Belum optimalnya penggunaan SIPD dalam mengelola aspirasi masyarakat (Musrenbang) dan pokok – pokok pikiran DPRD (Pokir)
	Kurangnya konsistensi dokumen perencanaan dengan penganggaran	Keterbatasan kewenangan dalam proses asistensi penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
	Belum optimalnya hasil pengendalian dan evaluasi	Terjadi perubahan-perubahan regulasi perencanaan pada saat pelaksanaan tahun RPJMD/Renstra PD berjalan
	Belum optimalnya implementasi hasil - hasil Kelitbang untuk Perencanaan dan Pembangunan Daerah	Rekomendasi hasil Penelitian belum sepenuhnya dijadikan acuan dalam penyusunan dokumen rencana kerja



3.2 TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH PROVINSI

3.2.1 Telaahan Renstra K/L

Pada sub ini akan diuraikan identifikasi permasalahan yang harus dihadapi Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Pangkalpinang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya terkait pelaksanaan sasaran jangka menengah Renstra Kementerian/Kelembagaan Bappenas.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam RPJMN 2020-2024, Visi Pembangunan Nasional yang merupakan Visi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2020-2024 adalah: **"Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong."**

Visi Bappenas yaitu : **"Perencanaan Pembangunan Nasional yang berkualitas dan kredibel untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong".**

Untuk mewujudkan visi yang telah dirumuskan tersebut, maka ditetapkan misi Kementerian PPN/Bappenas tahun 2020-2024, yaitu:

Misi 1 : Menyelenggarakan perencanaan yang mampu mengarahkan pelaksanaan pembangunan dalam pencapaian kemajuan dan kesejahteraan bangsa.

Misi 2 : Memperkuat kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan yang efektif dan efisien.

Berdasarkan uraian, Badan Perencanaan, Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah mendukung pelaksanaan Misi ke-1 yaitu Menyelenggarakan perencanaan yang mampu mengarahkan pelaksanaan pembangunan dalam pencapaian kemajuan dan kesejahteraan bangsa. melalui peningkatan kapasitas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan serta didukung pengelolaan anggaran dan keuangan yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat.



Tujuan Kementerian PPN/Bappenas pada kedua misi yang terkait dengan Perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan adalah peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan dan tata kelola pemerintahan dan pembangunan di daerah. Untuk mewujudkan Visi dan Misi diatas, Kementerian PPN/Bappenas menetapkan 3 (tiga) tujuan yang akan di capai dalam 5 (lima) tahun ke depan, sebagai berikut:

Misi-1 :

- Tujuan-1 : Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dan mempercepat kemajuan Indonesia.
- Tujuan-2 :Mewujudkan daya tanggap dan inovasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Misi-2 :

- Tujuan-3 : Mewujudkan tata kelola pelayanan perencanaan yang berkualitas, akuntabel, efektif dan efisien.

Sasaran strategis yang ingin dicapai adalah:

- a. Meningkatnya kualitas pelaksanaan otonomi daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah;
- b. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah;
- c. Menguatnya peran Walikota sebagai Wakil Pemerintah dalam pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Arah kebijakan yang telah ditetapkan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah adalah meningkatkan kualitas pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional, melalui strategi:

- a. peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah;
- b. mendorong harmonisasi, keselarasan dan sinergitas pembangunan antar Daerah serta antara pusat dan daerah;



- c. peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah.

Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada tabel berikut:



TABEL 3.3.1.1
MATRIK TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TERHADAP FUNGSI PELAYANAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	HASIL TELAHAN
"Perencanaan Pembangunan Nasional yang berkualitas dan kredibel untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"	- Menyelenggarakan perencanaan yang mampu mengarahkan pelaksanaan pembangunan dalam pencapaian kemajuan dan kesejahteraan bangsa; - Menguatkan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan yang efektif dan efisien	- Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dan mempercepat kemajuan Indonesia. - Mewujudkan daya tanggap dan inovasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. - Mewujudkan tata kelola pelayanan perencanaan yang berkualitas, akuntabel, efektif dan efisien	- Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi Perencanaan pembangunan nasional. - Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional. - Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner. - Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM.	- Menyusun perencanaan yang inovatif dan inklusif berdasarkan bukti (<i>evidence based planning</i>). - Memastikan terlaksananya rencana pembangunan nasional secara efektif dan efisien melalui pengendalian proses pembangunan. - Mendorong Kementerian PPN/Bappenas dalam percepatan pelaksanaan pembangunan nasional. - Meningkatkan kualitas pengelolaan Prioritas Nasional bidang Geopark, KSST, dan Penguatan Perencanaan dan Penganggaran.	Terhadap tujuan dan sasaran Kementerian PPN/Bappenas telah memberikan arahan bahwa institusi Bappeda di daerah harus pula dapat mewujudkan setiap perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada hasil untuk mempercepat kemajuan daerah dan daya tanggap serta inovasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan tata kelola pelayanan perencanaan yang berkualitas, akuntabel, efektif dan efisien Terhadap arah kebijakan dan strategi terdapat arahan kerja nasional yang sesuai dengan agenda Nawacita, dapat menjadi masukan untuk peningkatan kinerja Bappeda dan Litbang di daerah antara lain: pentingnya untuk melaksanakan penguatan kelembagaan;



VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	HASIL TELAHAN
				5. Meningkatkan kinerja Kementerian PPN/ Bappenas sebagai lembaga perencanaan pembangunan yang berkualitas dan kredibel.	2. koordinasi perencanaan dan penganggaran yang berbasis kinerja; 3. penyusunan rencana pembangunan di bidang aparatur dan masyarakat. Berkaitan dengan upaya peningkatan kualitas hasil evaluasi yang menjadi arah kebijakan nasional terdapat hal yang perlu di garis bawahi bahwa evaluasi tidak hanya harus dilaksanakan pada tingkat kebijakan akan tetapi juga pada tingkat kajian-kajian perencanaan. Peningkatan kualitas data dan informasi serta reformasi birokrasi. Terhadap strategi yang diarahkan Kementerian PPN/Bappenas yang juga harus dilaksanakan oleh daerah adalah bahwa strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan dan koordinasi perencanaan



VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	HASIL TELAHAN
					pembangunan yang berkualitas harus mencakup berbagai pembangunan dari segi internal maupun eksternal institusi perencanaan, sebagaimana strategi institusi perencanaan nasional, yang tentunya disesuaikan dengan potensi, masalah, peluang dan tantangan di tingkat daerah. Terhadap program prioritas dapat ditelaah bahwa institusi perencanaan nasional memprioritaskan agenda pembangunan yaitu Program Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai bagian dari program teknis di samping program-program generik. Adapun untuk institusi perencanaan daerah terdapat program-program teknis lainnya seperti perencanaan ruang yang menginduk pada program-program teknis kementerian.

Sumber: Renstra Kementerian Negara PPN/Bappenas dan hasil analisis, Tahun 2020.

Berikut ini disajikan analisis permasalahan layanan, faktor penghambat dan pendorong pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan dalam pencapaian visi dan misi, tujuan dan sasaran Renstra Kementerian PPN/Bappenas.

TABEL : 3.3.1.2.

PERMASALAHAN PELAYANAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH BERDASARKAN SASARAN RENSTRA KEMENTERIAN/LEMBAGA BAPPENAS BESERTA FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDORONG KEBERHASILAN PENANGANANNYA

Sasaran	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)
Sasaran strategis Untuk mencapai Visi dan Misi serta Tujuan dari Kementerian PPN/Bappenas di tahun 2020-2024, terdapat 4 (empat) Sasaran Strategis yang telah dirumuskan yaitu: Tujuan - 1 : • Sasaran Strategis 1: Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional. • Sasaran Strategis 2: Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional. Tujuan - 2 : • Sasaran Strategis 3: Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner. Tujuan - 3 : • Sasaran Strategis 4: Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM.	1. belum optimalnya ketersediaan sumber data dan informasi yang mendukung proses perencanaan; 2. belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi dalam proses perencanaan; 3. belum optimalnya monitoring dan evaluasi program perencanaan pembangunan; 4. masih lemahnya integrasi sistem data perencanaan dan evaluasi antara Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan dengan perangkat daerah; 5. belum terpenuhinya kebutuhan hasil penelitian dan pengembangan untuk menunjang kinerja pembangunan	▪ Kapasitas dan kompetensi SDM Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan masih kurang; ▪ Dukungan PD dalam perwujudan perencanaan yang berkualitas masih kurang.	▪ Dukungan anggaran dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan tergolong baik; ▪ adanya komitmen bersama untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja pembangunan.

Sasaran	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)
	daerah.		

Sumber: Analisis terhadap Renstra Kelembagaan/Kementerian Bappenas, Tahun 2023

3.3.2 Telaahan Renstra Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Sasaran yang ingin dicapai dalam dalam Renstra Bappeda dan Litbang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah :

1. Meningkatnya kesesuaian pelaksanaan program pembangunan
2. Meningkatnya kualitas dokumen dokumen perencanaan perangkat daerah.
3. Meningkatnya kualitas pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah.
4. Meningkatnya kualitas pengendalian dan evaluasi perencanaan Perangkat Daerah.
5. Meningkatkan tata kelola internal Perangkat Daerah

Sesuai dengan tugas dan fungsi, Bappeda dan Litbang Kota Pangkalpinang mendukung pencapaian sasaran Renstra Bappeda dan Litbang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ke 1 sampai 5 yaitu meningkatnya kesesuaian pelaksanaan program pembangunan, meningkatnya kualitas dokumen perencanaan perangkat daerah, meningkatnya kualitas pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah, meningkatnya kualitas pengendalian dan evaluasi perencanaan perangkat daerah dan meningkatkan tata kelola internal Bappeda dan Litbang Kota Pangkalpinang

Adapun faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran Renstra Bappeda dan Litbang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. tercantum pada tabel berikut:

Tabel 3.3.2.1
Permasalahan Pelayanan Bappeda dan Litbang Kota Pangkalpinang
berdasarkan Sasaran Renstra Bappeda dan Litbang Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung beserta Faktor Penghambat dan
Pendorong Keberhasilan Penanganannya

Sasaran Jangka Menengah Renstra Provinsi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
		Penghambat	Pendorong
1. Meningkatnya Kesesuaian Pelaksanaan Program Pembangunan.	1. Belum optimalnya ketersediaan sumber data dan informasi yang mendukung proses perencanaan.	▪ Kapasitas dan kompetensi SDM Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan masih kurang.	▪ Dukungan anggaran dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan tergolong baik.
2. Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan perangkat daerah.	2. Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung.	▪ Dukungan Perangkat Daerah dalam perwujudan perencanaan yang berkualitas masih kurang	▪ Adanya komitmen bersama untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja pembangunan
3. Meningkatnya kualitas pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah.	3. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi dalam proses perencanaan.	▪ Belum dimanfaatkannya hasil evaluasi untuk merancang perencanaan selanjutnya	▪ Adanya kemitraan dengan NGO dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang baik
4. Meningkatnya kualitas pengendalian dan evaluasi perencanaan Perangkat Daerah.	4. Belum optimalnya koordinasi antara institusi perencana dengan penganggaran dalam upaya menjaga konsistensi antara perencanaan, dan penganggaran sehingga program dan kegiatan yang telah direncanakan tidak tereduksi di dalam proses penganggaran.		
5. Meningkatnya tata kelola internal Perangkat Daerah (Bappeda)	5. Belum optimalnya monitoring dan evaluasi program perencanaan pembangunan.		
	6. Masih lemahnya integrasi sistem data perencanaan dan evaluasi antara Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah dengan perangkat daerah.		
	7. Belum optimalnya pelaksanaan <i>e-planning</i> untuk menyerap usulan masyarakat di dalam		

Sasaran Jangka Menengah Renstra Provinsi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
		Penghambat	Pendorong
	musrenbang di berbagai tingkatan. 8. Belum terpenuhinya kebutuhan hasil penelitian dan pengembangan untuk menunjang kinerja pembangunan daerah 9. Belum optimalnya pemahaman tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang		

Sumber: Analisis terhadap Renstra Bappeda dan Litbang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023

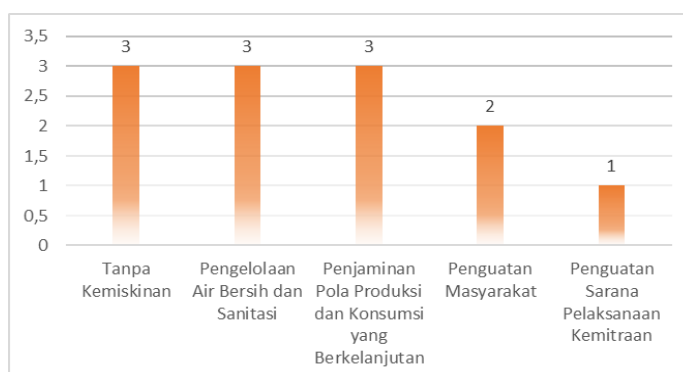
3.3 HASIL TELAAHAN TERHADAP TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB/SDGs)

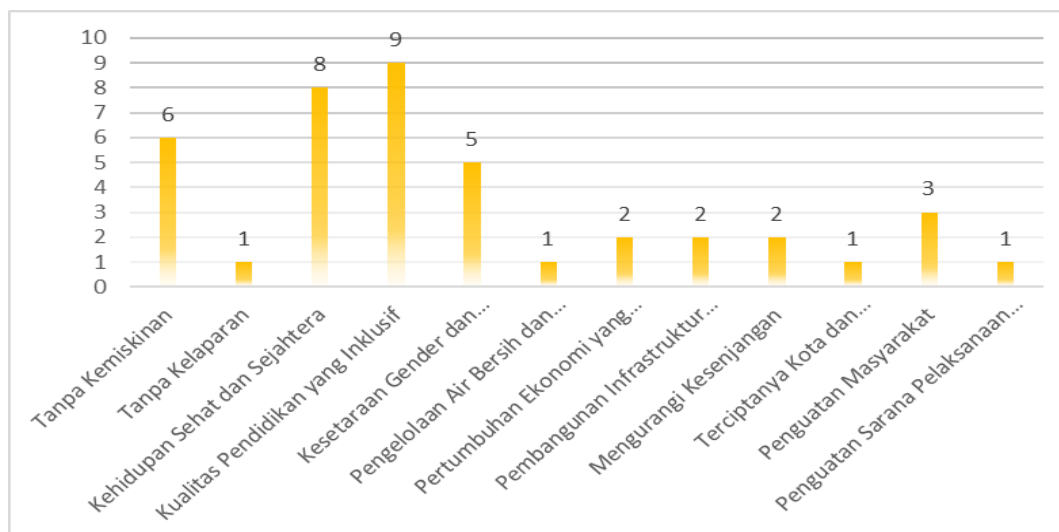
3.3.1 Pencapaian TPB

Adapun pencapaian TPB Kota Pangkalpinang berdasarkan hasil analisis data dapat dikategorikan ke dalam 4 (empat) kategori.

1. Indikator Belum Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target

Grafik di bawah menunjukkan jumlah indikator-indikator yang termasuk dalam kategori belum dilaksanakan. Berdasarkan hasil telaah yang dilakukan, indikator pada kategori ini belum terangkum hingga tahun 2021





Indikator TPB yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional sebanyak 12 indikator dari 5 tujuan TPB/SDGs, yaitu: TPB/SDGs tujuan 1 sebanyak 3 indikator, tujuan 6 sebanyak 3 indikator, tujuan 12 sebanyak 3 indikator, tujuan 16 sebanyak 2 indikator dan tujuan terakhir yaitu penguatan sarana pelaksanaan kemitraan sebanyak 1 indikator. Jumlah indikator yang belum dilaksanakan Kota Pangkalpinang dan belum mencapai target nasional relatif banyak, yaitu 12 dari 198 indikator. Pemerintah Kota Pangkalpinang harus berupaya untuk mencapai indikator tersebut dengan mengimplementasikannya pada program dan kegiatan yang dilakukan PERANGKAT DAERAH yang relevan.

2. Indikator Sudah Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target

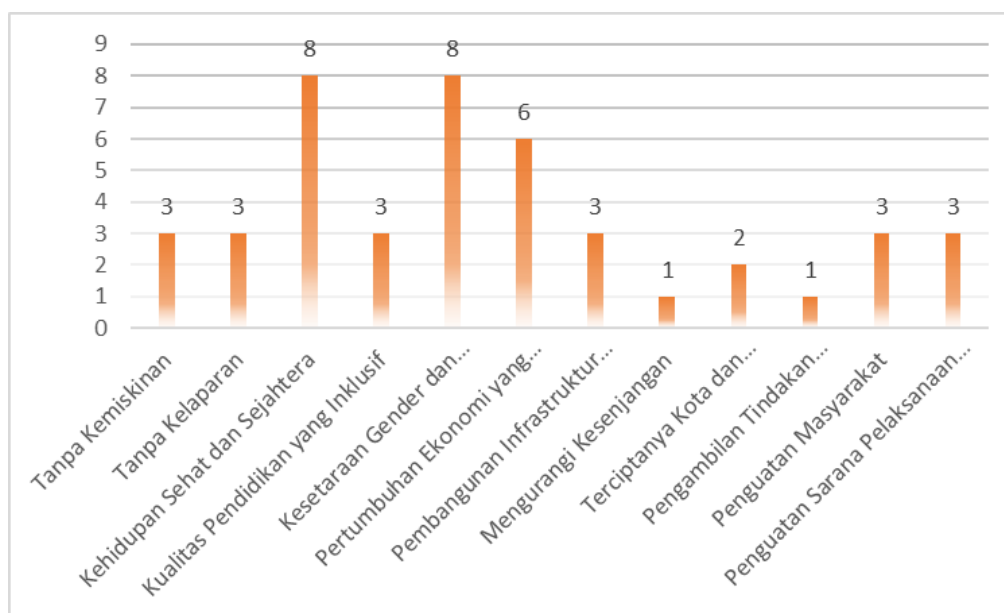
Berdasarkan hasil telaah yang dilakukan, indikator pada kategori ini sudah terangkum pada program dan kegiatan Perangkat Daerah, namun capaiannya belum memenuhi target. Indikator pada kategori ini terdapat pada hampir seluruh tujuan, dengan jumlah indikator pada setiap tujuan ditunjukkan pada grafik berikut.

Kota Pangkalpinang masih memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan total 44 indikator yang sudah dilaksanakan namun belum mencapai target. Indikator yang belum mencapai target terbanyak ditemui pada Tujuan 4 Kualitas Pendidikan yang inklusif sebanyak 9 indikator sedangkan jumlah paling sedikit ditemukan pada beberapa tujuan, antara lain tujuan 6, 17, 2, dan 11. Indikator-indikator yang sudah

dilaksanakan namun belum mencapai target memerlukan upaya tambahan di masa depan agar target dapat segera tercapai.

3. Indikator Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target

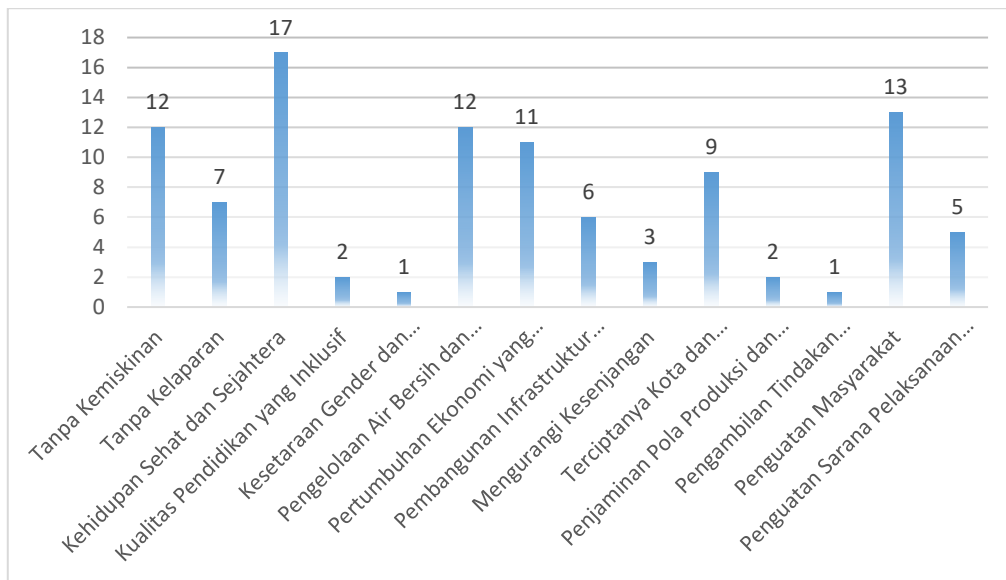
Jumlah indikator yang sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang dan sudah mencapai target dijabarkan pada grafik di bawah.



Tujuan dengan jumlah indikator paling banyak adalah tujuan 3 dan 5 yaitu “Kehidupan Sehat dan Sejahtera” dan “Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan”, dengan jumlah 8 indikator sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target. Total dari indikator yang sudah dilaksanakan dan sudah tercapai sebanyak 44 indikator, Pemerintah Kota Pangkalpinang perlu lebih meningkatkan ketercapaian indikator setiap tahunnya hingga tahun 2030.

4. Indikator Belum Memiliki Data

Di Kota Pangkalpinang terdapat sejumlah indikator yang belum memiliki data. Berikut merupakan rincian dari jumlah indikator yang belum memiliki data pada setiap TPB di Kota Pangkalpinang.



Terdapat 14 tujuan TPB yang di dalamnya terdapat indikator yang belum tersedia datanya sehingga belum dapat dilakukan pengolahan data untuk mengetahui capaian dan kesenjangan atau *gap* terhadap target yang ditetapkan. Oleh karena itu, 101 indikator yang belum memiliki data perlu menjadi perhatian Pemerintah Kota Pangkalpinang untuk segera memulai upaya untuk mewujudkannya melalui program-program pembangunan.

3.3.2 Perumusan Skenario Pencapaian TPB

1. Alternatif Skenario Proyeksi Tanpa Upaya Tambahan

Sejumlah 198 indikator yang telah sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional harus tetap dijaga, jangan sampai di kemudian hari pencapaiannya di bawah target nasional. Untuk itu, berikut adalah tiga alternatif skenario yang perlu dipertimbangkan oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang.

Skenario 1: Mempertahankan alokasi APBD untuk pelaksanaan 198 indikator TPB/SDGs tersebut, dengan asumsi bahwa tersedia anggaran yang cukup untuk melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan indikator TPB, termasuk indikator-indikator yang telah mencapai target nasional. Belum semua indikator yang telah mencapai target nasional di Pangkalpinang cukup kuat untuk dibiarkan tanpa intervensi lanjutan, sehingga masih dibutuhkan penganggaran

lanjutan. Dikhawatirkan apabila tidak dianggarkan pada APBD capaian sejumlah indikator akan mengalami penurunan.

Skenario 2: Mempertahankan program dan kegiatan untuk pelaksanaan seluruh TPB yang sudah mencapai target nasional dengan pengurangan alokasi anggaran. Asumsi yang digunakan untuk skenario ini adalah tetap mempertahankan program dan kegiatan dengan melakukan analisis ekonomi dimana pengurangan anggaran akan tetap menjamin kualitas program dan kegiatan tetap mencapai target nasional.

Skenario 3: Melakukan prioritas program kegiatan bagi indikator-indikator yang telah mencapai target nasional. Hanya program-program yang termasuk dalam skala prioritas akan disediakan alokasi anggaran. Skenario ini didasarkan pada asumsi adanya keterbatasan anggaran di Pemerintah Kota Pangkalpinang untuk melaksanakan seluruh program dan kegiatan TPB yang sudah mencapai target nasional. Sehingga hanya beberapa kegiatan yang dianggap prioritas yang masih harus dialokasikan ke dalam program dan kegiatan.

2. Alternatif Proyeksi dengan Upaya Tambahan

Untuk indikator-indikator TPB/SDGs yang sudah dilaksanakan namun belum mencapai target nasional (SB), yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target (BB), dan yang tidak ada data (TD), maka alternatif skenarionya adalah melakukan upaya tambahan, tentunya dengan penyediaan alokasi anggaran dan memerlukan upaya tambahan.

3.3.3 Rekomendasi Terhadap TPB/SDGs

TPB/SDGs merumuskan banyak sekali rekomendasi terkait dengan upaya untuk mencapai target-target dari indikator-indikator TPB/SDGs. Secara ringkas, rekomendasi-rekomendasi tersebut dapat dirangkum sebagai berikut.

1. Terkait dengan daya dukung lingkungan hidup, Pemerintah Kota Pangkalpinang perlu menerapkan prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) dalam mengelola daya dukung pangan dan air, karena di sebagian besar wilayahnya daya dukung kedua jasa lingkungan tersebut sudah terlampaui. Terkait dengan daya dukung pangan, Kota

Pangkalpinang sebagai ibukota provinsi memang tidak didesain sebagai pusat produksi pangan, namun lebih sebagai pusat pemerintahan dan permukiman, pusat perdagangan dan industri, pusat pelayanan sosial, pusat administrasi penambangan timah dan pusat lembaga keuangan. Dengan demikian pencukupan kebutuhan pangan memang tergantung pada impor dari daerah lain. Namun demikian, perlu diupayakan agar kantong-kantong wilayah produksi pangan jangan sampai punah.

Terkait dengan daya dukung air, Pemerintah Kota Pangkalpinang secara umum perlu: (a) menyediakan sarana dan prasarana air bersih bagi masyarakat; (b) melakukan pembangunan, penyuluhan dan pengawasan kualitas lingkungan hidup; dan (c) membangun sumber air baku melalui pembangunan waduk, kolong atau embung.

2. Terkait dengan indikator TPB/SDGs yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional (tanpa upaya tambahan) serta indikator yang sudah dilaksanakan tetapi belum tercapai target, indikator yang belum dilaksanakan dan indikator yang tidak tersedia data, Pemerintah Kota Pangkalpinang perlu melakukan upaya-upaya kreatif dengan keterbatasan anggaran untuk bagaimana agar indikator yang mencapai target dapat tetap terjaga dan indikator lainnya dimulai atau ditingkatkan upaya pencapaiannya lewat program-program agar seluruh indikator TPB/SDGs dapat terealisasi di Kota Pangkalpinang pada tahun 2030.

3.4 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Pangkalpinang secara umum dan dengan memperhatikan permasalahan mengacu pada Renstra Kementerian/Lembaga, Pencapaian TPB/SDGs dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Pangkalpinang 2024–2026 sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dapatlah diidentifikasi isu-isu strategis yang akan



menjadi landasan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Pangkalpinang tiga tahun mendatang sebagai berikut:

1. Penyediaan data perencanaan pembangunan yang akurat dan valid;
2. Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPD sebagai alat bantu mengelola aspirasi masyarakat dan pokok - pokok pikiran DPRD;
3. Sinkronisasi dan konsistensi antara dokumen perencanaan dengan penganggaran;
4. Optimalisasi pengendalian dan evaluasi;
5. Komitmen serta adanya regulasi terhadap implementasi hasil-hasil kelitbangan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda dan Litbang) Kota Pangkalpinang sebagai bagian integral dari Pemerintah Kota Pangkalpinang, yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam perencanaan pembangunan serta penelitian dan pengembangan, memiliki peran dan posisi strategis dalam kerangka pencapaian Tujuan pembangunan jangka menengah Kota Pangkalpinang, sebagaimana tertuang dalam RPD Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026.

Dalam kerangka tersebut, keberadaan Bappeda dan Litbang menjadi penentu dan pengendali dari pencapaian tujuan dan sasaran Pemerintah Kota. Untuk menjadikan Bappeda dan Litbang yang visioner tentu banyak aspek yang harus menjadi perhatian, karena hal ini berkaitan dengan keberadaannya sebagai lembaga penunjang urusan pemerintahan yang menyelenggarakan fungsi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan serta menjadi lokomotif pembangunan di Kota Pangkalpinang.

Penetapan Tujuan Pemerintah Kota tersebut juga didukung oleh fakta dan data bahwa fungsi perencanaan, penelitian dan pengembangan di masa mendatang sangat strategis dan menentukan kemajuan suatu daerah. Berdasarkan pemahaman tersebut, sangatlah rasional pada masa mendatang diperlukan langkah dan tindakan cerdas dalam rangka meningkatkan kualitas lembaga perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan sebagai lembaga yang profesional, berkualitas, akuntabel dan transparan.

Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah Bappeda dan Litbang yang tertuang dalam dokumen RPD Kota Pangkalpinang Tahun 2024 – 2026 dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Bappelitbangda dalam rangka pencapaian Tujuan dan Sasaran RPD
Kota Pangkalpinang
Tahun 2024-2026

Tujuan RPD	Sasaran RPD	Indikator Tujuan/Sasaran RPD	Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Tujuan/Sasaran PD
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Baik Menuju Tercapainya Good Governance		Indeks Reformasi Birokrasi			
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah	Nilai Sakip Kota			
			Mewujudkan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah yang berkualitas		Nilai evaluasi SAKIP dari komponen perencanaan
				Meningkatnya konsistensi program pembangunan RKPD dengan RPD	Persentase konsistensi program pembangunan di RKPD dengan RPD



**RENSTRA BAPPELITBANGDA KOTA PANGKALPINANG
TAHUN 2024-2026**

Tujuan RPD	Sasaran RPD	Indikator Tujuan/Sasaran RPD	Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Tujuan/Sasaran PD
				Tersusunnya Renstra perangkat daerah yang baik dan konsisten berpedoman ke Rencana Pembangunan Daerah	Persentase Renstra PD yang baik dan konsisten
				Akselerasi pengembangan dan pemanfaatan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah	Indeks Inovasi Daerah

Berdasarkan uraian tujuan dan sasaran jangka menengah Bappeda dan Litbang Kota Pangkalpinang yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Daerah yang tertuang dalam RPD Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026, dapat disimpulkan beberapa indikator yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda dan Litbang, seperti yang tergambarkan pada tabel berikut:

Tabel 4.2
Indikator Kinerja Utama Bappeda dan Litbang Kota Pangkalpinang
Tahun 2024 – 2026

Tujuan/Sasaran (IKU) Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran (IKU) Perangkat Daerah	Definisi Operasional
Mewujudkan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah yang berkualitas	Nilai evaluasi SAKIP dari komponen perencanaan	Nilai evaluasi SAKIP Kota komponen perencanaan dari KEMENPAN RB
Meningkatnya konsistensi program pembangunan RKPD dengan RPD	Persentase konsistensi program pembangunan di RKPD dengan RPD	Jumlah total program RKPD tahun berkenaan / Jumlah total program di RPD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan x 100 %
Tersusunnya Renstra perangkat daerah yang baik dan konsisten berpedoman ke Rencana Pembangunan Daerah	Persentase Renstra PD yang baik dan konsisten	Jumlah Renstra Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan konsisten mengacu ke RPD / Jumlah Total Renstra Perangkat Daerah x 100 %
Akselerasi pengembangan dan pemanfaatan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah	Indeks Inovasi Daerah	Hasil penilaian kementerian Dalam Negeri pada IGA Award



Berdasarkan beberapa uraian dan penjelasan terkait Tujuan dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda dan Litbang tahun 2024-2026, diperlukan penentuan target atas indikator kinerja yang ditetapkan. Hal ini dilakukan dalam rangka untuk mengetahui tingkat ketercapaian atas kinerja yang dihasilkan oleh Bappeda dan Litbang setiap tahunnya. Data target indikator kinerja tujuan dan sasaran Bappeda dan Litbang tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:



Tabel 4.3
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda dan Litbang Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Realisasi	Target Kinerja			Kondisi Akhir
				2021	2024	2025	2026	
Mewujudkan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah yang berkualitas		Nilai evaluasi SAKIP dari komponen perencanaan	Nilai	22.74	22,95	23,25	23,75	23,75
	Meningkatnya konsistensi program pembangunan RKPD dengan RPD	Persentase konsistensi program pembangunan di RKPD dengan RPD	%	-	100	100	100	100
	Tersusunnya Renstra perangkat daerah yang baik dan konsisten berpedoman ke Rencana Pembangunan Daerah	Persentase Renstra PD yang baik dan konsisten	%	90	90	95	100	100
	Akselerasi pengembangan dan pemanfaatan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah	Indeks Inovasi Daerah	Skor	54	55	56	57	57

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran Bappeda dan Litbang Kota Pangkalpinang menetapkan tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai dalam 3 (tiga) tahun ke depan adalah melalui:

1. Peningkatan konsistensi perencanaan kerja Perangkat Daerah dalam mendukung Rencana Kerja Pembangunan jangka pendek;
2. Peningkatan keselarasan perencanaan strategis Perangkat Daerah dalam mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
3. Peningkatan keselarasan program dalam APBD terhadap program dalam RKPD;
4. Optimalisasi peran perencana perangkat daerah dalam penyelenggaraan pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan pembangunan daerah;
5. Optimalisasi peran perencana perangkat daerah dalam penyelenggaraan pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan pembangunan daerah;
6. Peningkatan hasil penelitian yang dilaksanakan

5.2 Arah Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan yang diambil Bappeda dan Litbang Kota Pangkalpinang dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat peran perencanaan Kerja Perangkat Daerah dalam mendukung Rencana Kerja Pembangunan Daerah;

2. Memperkuat komitmen perangkat daerah dalam mendukung pelaksanaan rencana kerja pembangunan daerah;
3. Memperkuat peran koordinasi antar *stakeholder* dalam perencanaan pembangunan;
4. Memperkuat kedudukan dokumen perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan serta litbang sebagai dasar pelaksanaan program dan kegiatan;
5. Meningkatkan peran koordinasi terhadap perangkat daerah Pengampu dalam mendukung kesesuaian program di APBD terhadap program dalam RKPD;
6. Meningkatkan hasil penelitian yang dilaksanakan.

Keterkaitan antara strategi dan arah kebijakan Bappeda dan Litbang Kota Pangkalpinang dalam tiga tahun mendatang dicantumkan pada tabel berikut ini.



Tabel 5.1
Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Pelayanan
Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Pangkalpinang

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Visi RPJPD 2007-2026:	Meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan yang berbasis perdagangan dan jasa dengan dukungan industri unggulan		
Misi RPJPD 2007-2026 yang terkait:	Menjalin kerjasama yang baik antardinas, antar pemerintah daerah dan antara pemerintah, dewan dan masyarakat guna mencapai masyarakat yang adil, makmur, aman dan damai		
Meningkatkan Capaian Indikator Sasaran Daerah	Meningkatnya Konsistensi Program RPJMD dengan RKPD	1. Peningkatan konsistensi perencanaan kerja PERANGKAT DAERAH dalam mendukung Rencana Kerja Pembangunan jangka pendek	1. Menguatkan peran perencanaan Kerja Organisasi Perangkat Daerah dalam mendukung Rencana Kerja Pembangunan Daerah
		2. Peningkatan keselarasan perencanaan strategis PERANGKAT DAERAH dalam mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah	2. Menguatkan komitmen PERANGKAT DAERAH dalam mendukung pelaksanaan rencana kerja pembangunan daerah
		3. Peningkatan keselarasan program dalam APBD terhadap program dalam RKPD	3. Menguatkan peran koordinasi antar <i>stakeholder</i> dalam perencanaan pembangunan



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		4. Optimalisasi peran perencana perangkat daerah dalam penyelenggaraan pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan pembangunan daerah	4. Memperkuat kedudukan dokumen perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan serta litbang sebagai dasar pelaksanaan program dan kegiatan
		5. Optimalisasi peran perencana perangkat daerah dalam penyelenggaraan pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan pembangunan daerah	5. Meningkatkan peran koordinasi terhadap PERANGKAT DAERAH Pengampu dalam mendukung kesesuaian program di APBD terhadap program dalam RKPD
		6. Peningkatan hasil penelitian yang dilaksanakan	6. Meningkatkan hasil penelitian yang dilaksanakan

Sumber: Renstra Bappeda dan Litbang Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026

BAB VI PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan kegiatan Bappeda dan Litbang Kota Pangkalpinang yang akan dilaksanakan merupakan bagian dari program pembangunan Kota Pangkalpinang yang berisi program prioritas terpilih untuk mewujudkan visi dan misi kota.

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023, Sejak tahun 2021 terjadi perubahan program dan kegiatan yang mengacu ke Permendagri nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Adapun rencana program, kegiatan dan sub Tahun 2024-2026 terdiri dari 4 Program, 18 kegiatan dan 78 Sub kegiatan yang mempunyai 1 (satu) program prioritas yaitu program penelitian dan pengembangan daerah sebagaimana rincian meliputi berikut :

1.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
	3.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
	4.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
	5.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
	6.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
	7.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	8.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	9.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
	10.	Pengelolaan dan Penyiapan bahan Tanggapan Pemeriksaan

	11.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulanan/Semesteran SKPD
	12.	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
3.		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
	13.	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
4.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	14.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
	15.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
5.		Administrasi Umum Perangkat Daerah
	16.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	17.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	18.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
	19.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
	20.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	21.	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
6.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	22.	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan
	23.	Pengadaan Kendaraan Dinas atau kendaraan Dinas jabatan
	24.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	25.	Pengadaan Aset Tetap Lainnya
	26.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	27.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	28.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
7.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	29.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	30.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	31.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	32.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
8.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	33.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	34.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan
	35.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya

		36.	Pemeliharaan Aset tetap lainnya
		37.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
		38.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
		39.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2.			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
	9.		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
		40.	Pelaksanaan Konsultasi Publik
		41.	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah /Lintas Perangkat Daerah
		42.	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
		43.	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
	10.		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
		44.	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
		45.	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD
		46.	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
	11.		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
		47.	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota
		48.	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah
		49.	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
3.			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	12.		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
		50.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
		51.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
		52.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
		53.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan
		54.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia
	13.		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
		55.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
		56.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
		57.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian

		58.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
		59.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA
	14.		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
		60.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
		61.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur
		62.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
		63.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan
4.			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	15.		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
		64.	Fasilitasi Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum
		65.	Pengelolaan data Kelitbangan dan Peraturan
	16.		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
		66.	Penelitian dan Pengembangan Aspek-Aspek Sosial
		67.	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata
		68.	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
		69.	Penelitian dan Pengembangan pendidikan dan Kebudayaan
		70.	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	17.		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
		71.	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman
		72.	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan
		73.	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan
		74.	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup
		75.	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum
	18.		Pengembangan Inovasi dan Teknologi
		76.	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi
		77.	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi
		78.	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif

Secara rinci rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif secara rinci tercantum pada Tabel 6.1 berikut:



Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Pangkalpinang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan SubKegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						K	Rp	KK	Rp	KK	Rp	KK	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	((8)	((9)	(10)	((11)	1(12)	((13)	(14)	(15)	(16)
		5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Nilai)	77.09	78	5.525.664.490	78.5	5.787.752.816	79	5.864.841.141	79	17.178.258.447	SEKRETARIS (BAPPELITBANGDA)	
				Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Nilai)	NA	85		90		95		95		SEKRETARIS (BAPPELITBANGDA)	
		5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyampaian dokumen perencanaan, penganggaran dan kinerja perangkat daerah tepat waktu (Dengan Satuan:%)	100	100	9.000.000	100	9.000.000	100	9.000.000	100	27.000.000	KASSUBAG PEP DAN KEUANGAN	



**RENSTRA BAPPELITBANGDA KOTA PANGKALPINANG
TAHUN 2024-2026**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan SubKegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja PD Pengguganjab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						K	Rp	KK	Rp	KK	Rp	KK	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	((8)	((9)	(10)	((11)	1(12)	((13)	(14)	(15)	(16)
		5.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	NA	2	2.000.000	2	2.000.000	2	2.000.000	2	6.000.000	KASSUBAG PEP DAN KEUANGAN	K Pangkalpinang
		5.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	NA	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	3.000.000	KASSUBAG PEP DAN KEUANGAN	K Pangkalpinang
		5.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan LaporanHasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	NA	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	3.000.000	KASSUBAG PEP DAN KEUANGAN	K K Pangkalpinang
		5.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	NA	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	3.000.000	KASSUBAG PEP DAN KEUANGAN	K Pangkalpinang
		5.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan LaporanHasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	NA	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	3.000.000	KASSUBAG PEP DAN KEUANGAN	K Pangkalpinang
		5.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	NA	4	2.000.000	4	2.000.000	4	2.000.000	4	6.000.000	KASSUBAG PEP DAN KEUANGAN	K Pangkalpinang



DIREKTORAT BAPPETITBANGDA KOTA PANGKALPINANG
TAHUN 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan SubKegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana- naan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja PD Pena nggu ngja wab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						K	Rp	KK	Rp	KK	Rp	KK	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	((8)	((9)	(10)	((11)	1(12)	((13)	(14)	(15)	(16)
		5.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	NA	4	1.000.000	4	1.000.000	4	1.000.000	4	3.000.000	KASSUBAG PEP DAN KEUANGAN	K Pangkalpinang
		5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya laporan keuangan perangkat sesuai SAP (Dengan Satuan:%)	NA	100	3.715.264.520	100	3.719.164.520	100	3.751.264.520	100	11.185.693.560	KASSUBAG PEP DAN KEUANGAN	
		5.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang/bulan)	NA	35	3.707.264.520	35	3.711.164.520	35	3.743.264.520	35	11.161.693.560	KASSUBAG PEP DAN KEUANGAN	K Pangkalpinang
		5.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	NA	4	4.000.000	4	4.000.000	4	4.000.000	4	12.000.000	KASSUBAG PEP DAN KEUANGAN	K Pangkalpinang
		5.01.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyia ^{an} Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dengan Satuan:Dokumen)	NA	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	3.000.000	KASSUBAG PEP DAN KEUANGAN	K Pangkalpinang
		5.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	NA	4	2.000.000	4	2.000.000	4	2.000.000	4	6.000.000	KASSUBAG PEP DAN KEUANGAN	K Pangkalpinang
		5.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dengan Satuan:Dokumen)	NA	2	1.000.000	2	1.000.000	2	1.000.000	2	3.000.000	KASSUBAG PEP DAN KEUANGAN	K Pangkalpinang



DIREKTORAT BAPPELITBANGDA KOTA PANGKALPINANG
TAHUN 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan SubKegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja PD Pengguganjab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						K	Rp	KK	Rp	KK	Rp	KK	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	((8)	((9)	(10)	((11)	1(12)	((13)	(14)	(15)	(16)
		5.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik perangkat daerah yang ditata dan diinventarisir (Dengan Satuan:%)	NA	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	100	3.000.000	KASSUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
	5.01.01.2.03.01		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	NA	1	500.000	1	500.000	1	500.000	1	1.500.000	KASSUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	K Pangkalpinang
	5.01.01.2.03.05		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	NA	4	500.000	4	500.000	4	500.000	4	1.500.000	KASSUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	K Pangkalpinang
		5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelanggaran disiplin pegawai perangkat daerah (Dengan Satuan:%)	NA	-20	120.000.000	37.5	120.000.000	100	150.000.000	100	390.000.000	KASSUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
	5.01.01.2.05.02		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Dengan Satuan:Paket)	NA	1	75.000.000	1	75.000.000	1	90.000.000	1	240.000.000	KASSUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	K Pangkalpinang
	5.01.01.2.05.09		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Dengan Satuan:Orang)	NA	15	45.000.000	15	45.000.000	15	60.000.000	15	150.000.000	KASSUBAG PEP DAN KEUANGAN	K K Pangkalpinang
		5.01.01.2.06	Administrasi Umum PerangkatDaerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah (Dengan Satuan:%)	100	100	308.352.470	100	296.540.796	100	541.529.121	100	1.146.422.387	KASSUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	



RENSTRA BAPPELITBANGDA KOTA PANGKALPINANG
TAHUN 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan SubKegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						K	Rp	KK	Rp	KK	Rp	KK	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	((8)	((9)	(10)	((11)	1(12)	((13)	(14)	(15)	(16)
		5.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	NA	1	10.000.000	1	10.000.000	1	20.000.000	1	40.000.000	KASSUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	K K Pangkalpinang
		5.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)		1	13.000.000	1	13.000.000	1	63.000.000	1	89.000.000	KASSUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	K Pangkalpinang
		5.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	NA	1	3.500.000	1	3.500.000	1	3.500.000	1	10.500.000	KASSUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	K Pangkalpinang
		5.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	NA	1	15.000.000	1	15.000.000	1	40.000.000	1	70.000.000	KASSUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	K Pangkalpinang
		5.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	NA	4	251.852.470	4	240.040.796	4	400.029.121	4	891.922.387	KASSUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	K Pangkalpinang
		5.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	NA	2	15.000.000	2	15.000.000	2	15.000.000	2	45.000.000	KASSUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	K Pangkalpinang
		5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik perangkat daerah (Dengan Satuan:%%)	NA	100	390.000.000	100	745.000.000	100	510.000.000	100	1.645.000.000	KASSUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	



DIREKTORAT BAPPETBANGDA KOTA PANGKALPINANG
TAHUN 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan SubKegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja PD Penggugjawab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						K	Rp	KK	Rp	KK	Rp	KK	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	((8)	((9)	(10)	((11)	1(12)	((13)	(14)	(15)	(16)
		5.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (DenganSatuan:Unit)	NA	5	0	5	330.000.000	5	0	5	330.000.000	KASSUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	K Pangkalpinang
		5.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	NA	1	0	1	25.000.000	1	0	1	25.000.000	KASSUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	K Pangkalpinang
		5.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan MesinLainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	NA	5	80.000.000	5	80.000.000	5	80.000.000	5	240.000.000	KASSUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	PPangkalpinang
		5.01.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	NA	5	10.000.000	5	10.000.000	5	30.000.000	5	50.000.000	KASSUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	K Pangkalpinang
		5.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	NA	1	100.000.000	1	100.000.000	1	150.000.000	1	350.000.000	KASSUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	K Pangkalpinang
		5.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	NA	5	100.000.000	5	100.000.000	5	120.000.000	5	320.000.000	KASSUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	K Pangkalpinang
		5.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	NA	5	100.000.000	5	100.000.000	5	130.000.000	5	330.000.000	KASSUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	K Pangkalpinang



DIREKTORAT BAPPELITBANGDA KOTA PANGKALPINANG
TAHUN 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan SubKegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja PD Penggugnang wab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						K	Rp	KK	Rp	KK	Rp	KK	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	((8)	((9)	(10)	((11)	1(12)	((13)	(14)	(15)	(16)
		5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan:%)	NA	100	537.047.500	100	537.047.500	100	542.047.500	100	1.616.142.500	KASSUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
	5.01.01.2.08.01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dengan Satuan:Laporan)	NA	4	65.000.000	4	65.000.000	4	70.000.000	4	200.000.000	KASSUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	K Pangkalpinang
	5.01.01.2.08.02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	NA	4	90.000.000	4	90.000.000	4	90.000.000	4	270.000.000	KASSUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	K Pangkalpinang
	5.01.01.2.08.03		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	NA	4	22.047.500	4	22.047.500	4	22.047.500	4	66.142.500	KASSUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	K Pangkalpinang
	5.01.01.2.08.04		Penyediaan Jasa Pelayanan UmumKantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	NA	4	360.000.000	4	360.000.000	4	360.000.000	4	1.080.000.000	KASSUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	K Pangkalpinang
		5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik perangkat daerah dalam kondisi baik (Dengan Satuan:%)	NA	100	445.000.000	100	360.000.000	100	360.000.000	100	1.165.000.000	KASSUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
	5.01.01.2.09.01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Dengan Satuan:Unit)	NA	5	85.000.000	1	85.000.000	1	85.000.000	5	255.000.000	KASSUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	K Pangkalpinang



Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan SubKegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja PD Penggabung	Lokasi
						2024		2025		2026					
						K	Rp	KK	Rp	KK	Rp	KK	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	((8)	((9)	(10)	((11)	1(12)	((13)	(14)	(15)	(16)
		5.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Dengan Satuan:Unit)	NA	5	89.562.784	5	133.200.000	5	133.200.000	5	354.962.784	KASSUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	K K Pangkalpinang
		5.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan MesinLainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Dengan Satuan:Unit)	NA	25	50.000.000	25	50.000.000	25	50.000.000	25	150.000.000	KASSUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	K Pangkalpinang
		5.01.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (DenganSatuan:Unit)	NA	2	50.000.000	2	25.000.000	2	25.000.000	2	100.000.000	KASSUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	K Pangkalpinang
		5.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	NA	2	70.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	170.000.000	KASSUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	K Pangkalpinang
		5.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	NA	2	70.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	170.000.000	KASSUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	K Pangkalpinang
		5.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	NA	2	70.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	170.000.000	KASSUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	K Pangkalpinang
	Tersusunnya Renstra perangkat daerah yang baik dan konsisten berpedoman ke Rencana Pembangunan Daerah														



RENSTRA BAPPELITBANGDA KOTA PANGKALPINANG
TAHUN 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan SubKegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana- naan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja PD Pena nggu ngja wab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						K	Rp	KK	Rp	KK	Rp	KK	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	((8)	((9)	(10)	((11)	1(12)	((13)	(14)	(15)	(16)
		5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Dokumen Perencanaan Tahunan Perangkat Daerah dengan Kualitas Baik (Dengan Satuan:%)	80	90	835.000.000	95	735.000.000	100	755.000.000	100	2.325.000.000	BIDANG PEMERINTAHAN, PEMBANGUNAN MANUSIA, PEREKONOMIAN DAN INFRASTRUKTUR	
				Persentase usulan masyarakat dan DPRD dalam Musrenbang dan Pokir yang terakomodir dalam dokumen perencanaan (Dengan Satuan:%)	NA	70		72		74		74		BIDANG PEMERINTAHAN, PEMBANGUNAN MANUSIA, PEREKONOMIAN DAN INFRASTRUKTUR	
		5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia dengan Kualitas Baik (Dengan Satuan:%)	100	100	295.000.000	100	275.000.000	100	275.000.000	100	845.000.000	SUB KOORDINATOR PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	



RENSTRA BAPPELITBANGDA KOTA PANGKALPINANG
TAHUN 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan SubKegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja PD Penggugwab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						K	Rp	KK	Rp	KK	Rp	KK	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	((8)	((9)	(10)	((11)	1(12)	((13)	(14)	(15)	(16)
				Presentase usulan masyarakat bidan dan pembangunan manusia dalam musrenbang yang terakomodir dalam dokumen perencanaan (Dengan Satuan:%)	5	5		5		5		5		SUB KOORDINATOR PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	
	5.01.03.2.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dengan Satuan:Dokumen)	NA	1	80.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	3	240.000.000	SUB KOORDINATOR PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	K Pangkalpinang	K
	5.01.03.2.01.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Dengan Satuan:Laporan)	NA	14	40.000.000	14	30.000.000	14	30.000.000	14	100.000.000	SUB KOORDINATOR PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	K Pangkalpinang	
	5.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan EvaluasiPenyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Dengan Satuan:Laporan)	NA	4	40.000.000	4	30.000.000	4	30.000.000	12	100.000.000	SUB KOORDINATOR PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	K Pangkalpinang	
	5.01.03.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan (Dengan Satuan:Laporan)	NA	2	75.000.000	2	75.000.000	2	75.000.000	6	225.000.000	SUB KOORDINATOR PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	K K Pangkalpinang	



RENSTRA BAPPELITBANGDA KOTA PANGKALPINANG
TAHUN 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan SubKegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana- naan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja PD Pena nggu ngja wab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						K	Rp	KK	Rp	KK	Rp	KK	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	((8)	((9)	(10)	((11)	1(12)	((13)	(14)	(15)	(16)
		5.01.03.2.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia (Dengan Satuan:Laporan)	NA	2	60.000.000	2	60.000.000	2	60.000.000	6	180.000.000	SUB K O O R D I N A T O R P E M E R I N T A H A N D A N P E M B A N G U N A N M A N U S I A	K Pangkalpinang
		5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah bidang perekonomian dan SDA dengan Kualitas Baik (Dengan Satuan:%)	100	100	260.000.000	100	220.000.000	100	220.000.000	100	700.000.000	SUB K O O R D I N A T O R P E R E K O N O M I A N D A N S U M B E R D A Y A A L A M	
				Presentase usulan masyarakat bidang perekonomian dan SDA dalam musrenbang yang terakomodir dalam dokumen perencanaan (Dengan Satuan:%)	0	4		7		10		10		SUB K O O R D I N A T O R P E R E K O N O M I A N D A N S U M B E R D A Y A A L A M	
		5.01.03.2.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	70.000.000	1	70.000.000	1	70.000.000	3	210.000.000	SUB K O O R D I N A T O R P E R E K O N O M I A N D A N S U M B E R D A Y A A L A M	K K Pangkalpinang



DIREKTORAT BAPPETITBANGDA KOTA PANGKALPINANG
TAHUN 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan SubKegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja PD Pengguganjab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						K	Rp	KK	Rp	KK	Rp	KK	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	((8)	((9)	(10)	((11)	1(12)	((13)	(14)	(15)	(16)
		5.01.03.2.02.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Dengan Satuan:Laporan)	8	7	50.000.000	7	30.000.000	7	30.000.000	7	110.000.000	SUB KOORDINATOR PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	K Pangkalpinang
		5.01.03.2.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan EvaluasiPenyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Dengan Satuan:Laporan)	8	7	50.000.000	7	30.000.000	7	30.000.000	7	110.000.000	SUB KOORDINATOR PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	K K Pangkalpinang
		5.01.03.2.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian (Dengan Satuan:Laporan)	NA	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	3	150.000.000	SUB KOORDINATOR PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	K Pangkalpinang
		5.01.03.2.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA (Dengan Satuan:Laporan)	NA	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	3	120.000.000	SUB KOORDINATOR PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	K K Pangkalpinang
		5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Dokumen Perangkat Daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan dengan Kualitas Baik (Dengan Satuan:%)	80	100	280.000.000	100	240.000.000	100	260.000.000	100	780.000.000	SUB KOORDINATOR INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN	



**RENSTRA BAPPELITBANGDA KOTA PANGKALPINANG
TAHUN 2024-2026**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan SubKegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana- naan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja PD Pena nggu ngja wab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						K	Rp	KK	Rp	KK	Rp	KK	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	((8)	((9)	(10)	((11)	1(12)	((13)	(14)	(15)	(16)
				Presentase usulan masyarakat infrastruktur kewilayahan dalam musrenbang terakomodir dalam dokumen perencanaan (Dengan Satuan:%)	13.24	15		17.50		20		20		SUB KOORDI NATOR INFRAS TRUKTUR DAN KEWILAYA HAN	
	5.01.03.2.03.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Dengan Satuan:Laporan)	4	12	50.000.000	12	30.000.000	12	40.000.000	12	120.000.000	SUB KOORDINAT OR INFRAS TRUKTUR DAN KEWILAYA HAN	K Pangkal pinang	
	5.01.03.2.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan EvaluasiPenyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Dengan Satuan:Laporan)	NA	3	50.000.000	3	30.000.000	3	40.000.000	3	120.000.000	SUB KOORDINAT OR INFRAS TRUKTUR DAN KEWILAYA HAN	K Pangkal pinang	
	5.01.03.2.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	300.000.000	SUB KOORDINAT OR INFRAS TRUKTUR DAN KEWILAYA HAN	K Pangkal pinang	



DIREKTORAT BAPPETITBANGDA KOTA PANGKALPINANG
TAHUN 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan SubKegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana- naan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja PD Pena nggu ngja wab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						K	Rp	KK	Rp	KK	Rp	KK	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	((8)	((9)	(10)	((11)	1(12)	((13)	(14)	(15)	(16)
		5.01.03.2.03.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan (Dengan Satuan:Laporan)	NA	1	80.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	1	240.000.000	SUB KOORDINATOR INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN	K Pangkalpinang
Mewujudkan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah yang berkualitas															
	Meningkatnya konsistensi program pembangunan RKPD dengan RPD														
		5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase konsistensi program RKPD dengan APBD (Dengan Satuan:%)	75	100	750.000.000	100	735.000.000	100	830.000.000	100	2.315.000.000	BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	
		5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tepat waktu (Dengan Satuan:%)	100	100	330.000.000	100	345.000.000	100	440.000.000	100	1.115.000.000	SUB KOORDINATOR PERENCANAAN DAN PENDANAAN	



DIREKTORAT BAPPETITBANGDA KOTA PANGKALPINANG
TAHUN 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan SubKegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						K	Rp	KK	Rp	KK	Rp	KK	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	((8)	((9)	(10)	((11)	1(12)	((13)	(14)	(15)	(16)
		5.01.02.2.01.01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik) (Dengan Satuan:Dokumen)	1	2	30.000.000	2	50.000.000	1	50.000.000	5	130.000.000	SUB KOORDINATOR PERENCANAAN DAN PENDANAAN	K Pangkalpinang
		5.01.02.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Berita Acara)	1	1	30.000.000	1	25.000.000	1	50.000.000	3	105.000.000	SUB KOORDINATOR PERENCANAAN DAN PENDANAAN	K Pangkalpinang
		5.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Berita Acara)	1	2	50.000.000	2	50.000.000	1	80.000.000	5	180.000.000	SUB KOORDINATOR PERENCANAAN DAN PENDANAAN	K Pangkalpinang
		5.01.02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) (Dengan Satuan:Dokumen)	2	4	220.000.000	3	220.000.000	2	260.000.000	9	700.000.000	SUB KOORDINATOR PERENCANAAN DAN PENDANAAN	K Pangkalpinang
		5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase data dan informasi pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah yang dapat diakses (Dengan Satuan:%)	NA	60	140.000.000	65	110.000.000	70	110.000.000	70	360.000.000	KOORDINATOR DATADAN INFORMASI	



DIREKTORAT BAPPETITBANGDA KOTA PANGKALPINANG
TAHUN 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan SubKegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja PD Pengguganjab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						K	Rp	KK	Rp	KK	Rp	KK	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	((8)	((9)	(10)	((11)	1(12)	((13)	(14)	(15)	(16)
		5.01.02.2.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) (Dengan Satuan:Dokumen)	3	3	50.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000	9	150.000.000	SUB KOORDINATOR DATA DAN INFORMASI	K Pangkalpinang
		5.01.02.2.02.02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi (Dengan Satuan:Orang)	80	80	40.000.000	80	40.000.000	80	40.000.000	80	120.000.000	SUB KOORDINATOR DATA DAN INFORMASI	K Pangkalpinang
		5.01.02.2.02.03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan (Dengan Satuan:Buku)	NA	1	50.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	3	90.000.000	SUB KOORDINATOR DATA DAN INFORMASI	K Pangkalpinang
		5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase rekomendasi hasil pengendalian dan evaluasi yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan:%)	60	65	280.000.000	70	280.000.000	75	280.000.000	75	840.000.000	SUB KOORDINATOR PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN	
		5.01.02.2.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan (Dengan Satuan:Laporan)	1	3	80.000.000	3	80.000.000	2	80.000.000	8	240.000.000	SUB KOORDINATOR PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN	K Pangkalpinang



RENSTRA BAPPELITBANGDA KOTA PANGKALPINANG
TAHUN 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan SubKegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						K	Rp	KK	Rp	KK	Rp	KK	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	((8)	((9)	(10)	((11)	1(12)	((13)	(14)	(15)	(16)
		5.01.02.2.03.02	Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya (Dengan Satuan:Kerja Sama)	1	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	3	150.000.000	SUB KOORDINATOR PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN	K Pangkalpinang
		5.01.02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	1	9	150.000.000	9	150.000.000	9	150.000.000	27	450.000.000	SUB KOORDINATOR PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN	K Pangkalpinang
	Akselerasi pengembangan dan pemanfaatan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah														
		5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase implementasi rencana kelitbangan (Dengan Satuan:%)	75	60.00	1.604.941.580	71.43	1.390.000.000	100	1.470.000.000	100	4.464.941.580	BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
				Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah (Dengan Satuan:%)	78.79	100		100		100		100		BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	



**RENSTRA BAPPELITBANGDA KOTA PANGKALPINANG
TAHUN 2024-2026**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan SubKegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						K	Rp	KK	Rp	KK	Rp	KK	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	((8)	((9)	(10)	((11)	1(12)	((13)	(14)	(15)	(16)
		5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan (Dengan Satuan:%)	NA	100	155.006.092	0	0	100	110.000.000	100	265.006.092	SUB KOORDINATOR SOSIAL DAN PEMERINTAHAN	
	5.05.02.2.01.02		Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum (Dengan Satuan:Laporan)	NA	0	0	0	0	1	110.000.000	1	110.000.000	SUB KOORDINATOR SOSIAL DAN PEMERINTAHAN	
	5.05.02.2.01.12		Pengelolaan Data dan Kelitbangan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik (Dengan Satuan:Laporan)	NA	1	155.006.092	0	0	0	0	1	155.006.092	SUB KOORDINATOR SOSIAL DAN PEMERINTAHAN	K Pangkalpinang
	5.05.02.2.02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan (Dengan Satuan:%)	NA	100	165.787.096	100	240.000.000	100	180.000.000	100	585.787.096	SUB KOORDINATOR SOSIAL DAN PEMERINTAHAN	
	5.05.02.2.02.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial (Dengan Satuan:Dokumen)	NA	0	0	0	0	1	90.000.000	1	90.000.000	SUB KOORDINATOR SOSIAL DAN PEMERINTAHAN	K Pangkalpinang



DIREKTORAT BAPPETITBANGDA KOTA PANGKALPINANG
TAHUN 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan SubKegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja PD Pengguganjab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						K	Rp	KK	Rp	KK	Rp	KK	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	((8)	((9)	(10)	((11)	1(12)	((13)	(14)	(15)	(16)
		5.05.02.2.02.02	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dengan Satuan:Dokumen)	NA	0	0	0	0	1	90.000.000	1	90.000.000	SUB KOORDINATOR SOSIAL DAN PEMERINTAHAN	K Pangkalpinang
		5.05.02.2.02.03	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan (Dengan Satuan:Dokumen)	NA	1	165.787.096	0	0	0	0	1	165.787.096	SUB KOORDINATOR SOSIAL DAN PEMERINTAHAN	K Pangkalpinang
		5.05.02.2.02.05	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata (Dengan Satuan:Dokumen)	NA	0	0	1	150.000.000	0	0	1	150.000.000	SUB KOORDINATOR SOSIAL DAN PEMERINTAHAN	K Pangkalpinang
		5.05.02.2.02.06	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Dengan Satuan:Dokumen)	NA	0	0	1	90.000.000	0	0	1	90.000.000	SUB KOORDINATOR SOSIAL DAN PEMERINTAHAN	K Pangkalpinang
		5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan (Dengan Satuan:%)	NA	100	344.148.392	100	210.000.000	100	240.000.000	100	794.148.392	SUB KOORDINATOR EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	



RENSTRA BAPPELITBANGDA KOTA PANGKALPINANG
TAHUN 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan SubKegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana-naan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja PD Pena nggu ngja wab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						K	Rp	KK	Rp	KK	Rp	KK	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	((8)	((9)	(10)	((11)	1(12)	((13)	(14)	(15)	(16)
		5.05.02.2.03.02	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan (Dengan Satuan:Dokumen)	NA	0	0	0	0	1	150.000.000	1	150.000.000	SUB KOORDINAT OR EKONOMI DAN PEMBANGUN AN	K Pangkal pinang
		5.05.02.2.03.05	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan (Dengan Satuan:Dokumen)	NA	0	0	1	90.000.000	0	0	1	90.000.000	SUB KOORDINAT OR EKONOMI DAN PEMBANGUN AN	K Pangkal pinang
		5.05.02.2.03.07	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup (Dengan Satuan:Dokumen)	NA	0	0	0	0	1	90.000.000	1	90.000.000	SUB KOORDINAT OR EKONOMI DAN PEMBANGUN AN	K Pangkal pinang
		5.05.02.2.03.09	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum (Dengan Satuan:Dokumen)	NA	1	344.148.392	0	0	0	0	1	344.148.392	SUB KOORDINAT OR EKONOMI DAN PEMBANGUN AN	K Pangkal pinang
		5.05.02.2.03.11	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Dengan Satuan:Dokumen)	NA	0	0	1	120.000.000	0	0	1	120.000.000	SUB KOORDINAT OR EKONOMI DAN PEMBANGUN AN	K Pangkal pinang



Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan SubKegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja PD Penggugwab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						K	Rp	KK	Rp	KK	Rp	KK	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	((8)	((9)	(10)	((11)	1(12)	((13)	(14)	(15)	(16)
		5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase implementasi rencana inovasi dan teknologi (Dengan Satuan:%%)	NA	100	940.000.000	100	940.000.000	100	940.000.000	100	2.820.000.000	SUB KOORDINATOR INOVASI DAN TEKNOLOGI	
	5.05.02.2.04.01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan,dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	210.000.000	1	210.000.000	1	210.000.000	3	630.000.000	SUB KOORDINATOR INOVASI DAN TEKNOLOGI		
	5.05.02.2.04.02	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	380.000.000	1	380.000.000	1	380.000.000	3	1.140.000.000	SUB KOORDINATOR INOVASI DAN TEKNOLOGI		
	5.05.02.2.04.03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	350.000.000	1	350.000.000	1	350.000.000	3	1.050.000.000	SUB KOORDINATOR INOVASI DAN TEKNOLOGI		
TOTAL:						8.715.606.070		8.647.752.816		8.919.841.141		26.283.200.027			

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAKAN URUSAN

Bagian penting dalam proses penyusunan RENSTRA Bappeda dan Litbang Kota Pangkalpinang adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja penyelenggaraan urusan adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Bappeda dan Litbang Kota Pangkalpinang dalam tiga tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026. Target indikator kinerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Pangkalpinang yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja Bappeda dan Litbang Kota Pangkalpinang selama tiga tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Pangkalpinang. Indikator kinerja penyelenggaraan urusan ini ditampilkan dalam Tabel 7.1 sebagai berikut:



Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026

No.	Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPD	Target			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
						2024	2025	2026	
	Mewujudkan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah yang berkualitas		Nilai evaluasi SAKIP dari komponen perencanaan	Nilai	22,74	22,95	23,25	23,75	23,75
		Meningkatnya konsistensi program pembangunan RKPD dengan RPD	Persentase konsistensi program pembangunan di RKPD dengan RPD	%	100	100	100	100	100
		Tersusunnya Renstra perangkat daerah yang baik dan konsisten berpedoman ke Rencana Pembangunan Daerah	Persentase Renstra PD yang baik dan konsisten	%	90	90	95	100	100
		Akselerasi pengembangan dan pemanfaatan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah	Indeks Inovasi Daerah	skor					



	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	7,09	78	8,5	9	9
			Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah	Nilai	NA	85	0	5	5
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		Persentase konsistensi program RKPD dengan APBD	%	75	100	100	100	100
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		Persentase Dokumen Perencanaan Tahunan Perangkat Daerah dengan Kualitas Baik	%	80	90	95	100	100
			Persentase usulan masyarakat dalam musrenbang yang terakomodir dalam dokumen perencanaan	%	70	72	74	74	74
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		Persentase implementasi rencana kelitbang	%	75	60	71,43	100	100
			Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam dalam penerapan inovasi daerah	%	78,79	100	100	100	100

BAB VIII PENUTUP

8.1 Pedoman Transisi

Masa berlaku RENSTRA Bappeda dan Litbang Kota Pangkalpinang Tahun 2024–2026 adalah selama 3 (tiga) tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka RENSTRA Tahun 2024-2026 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan RENJA Bappeda dan Litbang Kota Pangkalpinang Tahun 2027, dengan tetap berpedoman pada RPJP D Kota Pangkalpinang Tahun 2007 - 2026.

8.2 Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan RENSTRA Bappeda dan Litbang Kota Pangkalpinang tahun 2024-2026 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Bappeda dan Litbang Kota Pangkalpinang agar mendukung pencapaian target-target RENSTRA dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum RENSTRA dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Bappeda dan Litbang Kota Pangkalpinang dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. RENSTRA akan dijabarkan dalam RENJA Bappeda dan Litbang Kota Pangkalpinang yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2024 hingga tahun 2026. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja wajib berpedoman pada RENSTRA.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target RENSTRA, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi



terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan RENSTRA secara berkala.

5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan RENSTRA Bappeda dan Litbang Kota Pangkalpinang sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pangkalpinang, Februari 2023

**KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN
PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA PANGKALPINANG,**

YAN RIZANA, ST., M.Si
NIP.19760123 200501 2 006